

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
KERJASAMA PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN PUSLITJAK DENGAN
JARLIT PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2014**

**JUDUL PENELITIAN:
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DITINJAU DARI KESIAPAN TENAGA
PENDIDIK (STUDI ANALISIS DI SEKOLAH DASAR NEGERI PROVINSI
GORONTALO)**

Oleh:

Ketua : Dr. Hj. RUSMIN HUSAIN, S.Pd, M.Pd
Anggota : 1. Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si
2. Dr. H. HAMKA A. HUSAIN, M.Pd



**JARLIT PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2014**



**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KERJASAMA PENELITIAN ANTARA
PUSLITJAK DENGAN JARLIT PROVINSI GORONTALO**

1. Judul Penelitian	Implementasi Kurikulum 2013 Ditinjau dari Kesiapan Tenaga Pendidik (Studi Analisis di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo)
2. Ketua Peneliti a. Nama Lengkap dan Gelar b. Jenias Kelamin c. Pangkat dan Golongan/Ruang d. NIP e. Nama Jarlit Provinsi f. Alamat Kantor g. Nomor HP h. E-mail address	Dr. Hj. Rusmin Husain, S.Pd, M.Pd Perempuan Pembina / IVa 19600614 198703 2 001 Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 08124313633 rusmin.husain@yahoo.co.id minhusain@gmail.com
3. Lama Penelitian	3 Bulan
4. Biaya Penelitian a. Beban Puslitjak b. Beban Jarlit Prov. Gorontalo c. Lainnya ...	Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) Rp ...

Gorontalo, November 2014

Mengetahui,
Plt. Kepala BLHRD Prov. Gorontalo Ketua Peneliti

**Ir. Rugaya Biki, M.Si
NIP. 19661204 199403 2 009**

**Dr. Hj. Rusmin Husain, S.Pd, M.Pd
NIP. 19600414 198703 2 001**

**IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DITINJAU DARI KESIAPAN
TENAGA PENDIDIK (STUDI ANALISIS DI SEKOLAH DASAR NEGERI
PROVINSI GORONTALO)**

OLEH:

**RUSMIN HUSAIN
MEIDY N. SILANGEN
HAMKA A. HUSAIN**

**KERJASAMA PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN PUSLITJAK
DENGAN JARLIT PROVINSI GORONTALO**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kurikulum 2013 ditinjau dari kesiapan tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum 2013 ditinjau dari kesiapan tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo dari sejumlah 98 responden yang siap implementasi kurikulum 2013 100%, yang sudah mengikuti sosialisasi sejumlah 98 orang (100%), sementara yang sudah mengikuti Diklat sejumlah 96 responden (97.96%). Berdasarkan hasil analisis wawancara dan kuisisioner dapat disimpulkan bahwa tenaga pendidik sudah memahami karakteristik kurikulum 2013, sudah siap mengimplementasikan kurikulum 2013 .

Kata Kunci: Kurikulum 2013, tenaga pendidik

*The Implmentation of curriculum 2013 Reviewed by the Preparation of
Educators (Analysis Study at the Elementary Schools in Gorontalo Province)*

By;

Rusmin Husain,dkk

*The cooperation research education policy PUSLITJAK with JARLIT
Gorontalo Province*

Abstract

The aim of the research was to know the understanding of curriculum 2013 and the implementation of curriculum 2013 reviewed by the preparation of educators at the elementary school in Gorontalo province. The approach of the research used descriptive qualitative. The result of the research pointed that the understanding of curriculum 2013 of 98 respondents, 100% already understand the characteristics of curriculum 2013. The implementation of curriculum 2013 reviewed by the preparation of educators at the elementary school in Gorontalo province from 98 respondent who already stand up to implement the curriculum 2013 around 100%, who already attended in the socialization around 98 respondent (100%), while who already trained in the training from 98 respondent around 97,96%. Based on the analysis of interview and questionnaire concluded the educators already understand the characteristic of curriculum 2013 and ready to implemented the curriculum 2013.

Keywords: curriculum 2013, educators.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Ilmu pengetahuan manusia berkembang dan beradaptasi sebagai makhluk biologis, sehingga hanya mampu beradaptasi dengan lingkungannya lah yang mampu bertahan hidup. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan yang lahir dari hasil pemikiran atau hasil pengkajian melalui penelitian, berkembang melalui proses dialektika, dan hanya yang relevan dengan perkembangan zamanlah yang mampu mempertahankan nilai kebenarannya/relevansinya. Namun, semua itu dihadapan Tuhan hal itu tak lebih dari secuil debu di hampan sahara, murni, tak terbantahkan, bahkan lebih dari itu, hingga manusia tak mampu membayangkannya. Pantaslah jika kita sujud dan tunduk di Maha Mengetahui itu. Atas kuasa-Nya pula penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini, dengan segala keterbatasan dan kelemahan baik dari dari segi penulisan maupun landasan teoritik.

Laporan penelitian ini disusun sebagai input kerja sama antara Puslitjak Kemdikbud RI dengan Jarlit Provinsi Gorontalo Tahun 2014, yang merupakan instrumen sinergitas dalam pelaksanaan penelitian guna mengungkap data dan informasi berbagai masalah pembangunan pendidikan dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan kebijakan pendidikan baik di pusat maupun daerah yang bermuara pada yang akurat, terkini, efisien dan efektif, serta terjadinya sinkronisasi dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan; sekaligus di sisi lain memberdayakan dan meningkatkan kemampuan Jarlit Daerah dalam penelitian kebijakan; dan semoga proposal penelitian ini dapat memenuhi ekspektasi tujuan mulia di atas.

Tim peneliti menyadari, bahwa laporan penelitian ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dalam berbagai hal yang dikarenakan sejumlah kendala; namun, demi komitmen yang tinggi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka peneliti berupaya semaksimal mungkin menyelesaikannya demi perbaikan dan peningkatan kualitas pembangunan pendidikan baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan peneliti demi perbaikan dan penyempurnaan laporan penelitian ini ke depannya.

Demikianlah, semoga laporan penelitian yang diajukan peneliti dapat memenuhi ekspektasi Puslitjak Kemdikbud RI, sebagai bagian input kerja sama penelitian kebijakan, sehingga sinkronisasi kebijakan pembangunan pendidikan antara pusat dengan daerah dapat

terwujud, demi terwujudnya manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.
Amiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Gorontalo, November 2014

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Abstract	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Ruang Lingkup.....	9
E. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Akademik.....	11
2. Manfaat Praktis	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Hakikat Kurikulum	14
B. Tinjauan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar	17
C. Hakikat Tenaga Pendidik.....	29
D. Tinjauan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Tenaga Pendidik Tentang Kurikulum.....	38
E. Kerangka pikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Latar Penelitian.....	47
B. Pendekatan dan Tipe Penelitian	52
C. Populasi dan Sampel	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Teknik Analisis Data	54
F. Pengecekan Keabsahan Data	55
G. Tahap-tahap Penelitian	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil.....	57
B. Pembahasan.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86
C. Rekomendasi	87

DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
Jadwal Kegiatan	91
SK Jarlit Kemendikbud.....	92
SK Jarlit Provinsi Gorontalo	94
Surat Permohonan Pengambilan Data Provinsi Gorontalo	95
Surat Izin Pengambilan Data Kepala Dinas Dikbudpora Prov Gorontalo.....	96
Kuisisioner	97
Dokumentasi Sekolah Sasaran dan Instansi yang terkait.....	111
Curriculum Vitae	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru selaku tenaga pendidik yang notabene terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, juga tidak luput dari sejumlah permasalahan mendasar. Pertama, sistem pendidikan profesi khususnya bagi guru selaku tenaga pendidik masih dalam tahap perintisan, sekalipun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru telah diakui sebagai salah satu jenis profesi. Hal ini pada gilirannya berimplikasi pada rendahnya kualitas guru. Kedua, distribusi guru yang belum merata. Sekalipun rasio perbandingan guru nasional berada pada tingkatan baik, namun fenomena kelebihan guru di satu tempat dengan kekurangan guru di tempat lain masih menjadi permasalahan pelik. Hal ini pada dasarnya diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain terbenturnya upaya pemerataan distribusi guru oleh kebijakan otonomi daerah yang menempatkan kewenangan pendidikan kepada pemerintah daerah serta sistem rekrutmen guru yang belum berbasiskan kebutuhan dan masih dihiasi polemik KKN. Permasalahan pertama dan kedua di atas turut berimplikasi pada permasalahan ketiga, yakni kompetensi dan pengembangan karir tenaga pendidik yang masih jauh dari apa yang diharapkan. Kompetensi khususnya untuk tenaga pendidik cenderung mengalami penurunan pasca lulus dari lembaga pendidikan; pengembangan karir tenaga pendidik seringkali mengalami ketidakjelasan akibat berhadapan dengan infiltrasi politik lokal yang kuat dalam pendidikan, seperti maraknya fenomena mutasi tenaga pendidik akibat ketidakcocokan dengan pejabat politik baik secara personal maupun kebijakannya. Permasalahan di atas pada dasarnya juga diakui secara terbuka oleh Ketua Umum PGRI (dalam kompas.com, 26 November 2012) serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (dalam okezone.com, 22 November 2013).

Permasalahan dalam ranah pendidikan dasar di atas turut dijustifikasi oleh sejumlah indikator pendidikan, seperti rasio siswa/sekolah sebesar 188 (idealnya 166) yang merupakan bagian dari indikator ketersediaan layanan pendidikan, sehingga tidak mengherankan bila terdapat fenomena siswa yang tidak terakomodasi dalam pendidikan dasar akibat jumlah sekolah dasar yang kurang, yang diperparah dengan tidak berimbang rasio antara sekolah dasar dan sekolah menengah sehingga banyak diantara lulusan sekolah dasar yang tidak tertampung pada pendidikan menengah; Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) sebesar 28,31 (idealnya 46) dan daerah terjangkau pada nilai 166 (idealnya 181) yang merupakan bagian dari indikator

keterjangkauan layanan pendidikan, sehingga tidak mengherankan bila secara kualitatif, akses pendidikan dasar masih merupakan hal yang sulit bagi sebagian kalangan khususnya golongan ekonomi lemah dan masyarakat di daerah pelosok; serta tingkat persentase guru selaku tenaga pendidik yang berada pada kualifikasi dibawah S1 sebesar 47,09 % dan masih terdapat 24,15 % ruang kelas yang berada pada kondisi rusak, yang kesemuanya itu menunjukkan kualitas layanan pendidikan yang jauh dari ideal (Kemdikbud, 2013).

Permasalahan pendidikan dasar di atas kian miris bila dikaitkan dengan polemik seperti budaya mencontek/plagiat yang mengakar pada peserta didik sejak kecil; kekerasan dalam dunia pendidikan baik yang dilakukan anak didik maupun tenaga pendidik yang mengalami tren meningkat yakni sebesar 20 % pada tahun 2013, sebagaimana dilansir KPAI dalam diskusi catatan pendidikan 2013 bersama FSGI dan sejumlah pemerhati pendidikan Indonesia (jpnn.com, 2 Januari 2014); merebaknya praktik asusila dikalangan anak usia sekolah sebanyak 1.182 anak, terlibat kriminalitas seperti pencurian sebanyak 1.957 anak, terjerat narkoba sebanyak 931 anak, penganiayaan sebanyak 358 anak, dan pembunuhan sebanyak 224 anak, yang sekalipun didominasi oleh kalangan anak usia 17-18 namun terdapat hal yang memprihatinkan yakni 6 diantaranya merupakan kategori anak usia sekolah dasar (Menkumham dalam republika.co.id, 23 Juli 2013). Sejumlah fenomena di atas memberikan kita bahan perenungan bahwa di republik tercinta ini sedang berlangsung proses dekadensi moral generasi muda yang massif.

Berbagai permasalahan pendidikan dasar Indonesia di atas nampaknya menjadi ironi di tengah tantangan persaingan global yang diperkirakan sebagian kalangan mengalami puncak pada era 2020-2035; era yang penuh dengan ketidakpastian akibat perubahan yang cepat dalam berbagai bidang terutama teknologi dan era yang dihiasi oleh kompetisi yang massif tanpa mengenal batas-batas wilayah kenegaraan; yang sekaligus menjadi tantangan para tenaga pendidik untuk mempersiapkan generasi emas pejuang bangsa. Hal ini menjadi urgen dan signifikan dikarenakan generasi yang kelak akan menjadi aktor-aktor penentu daya saing Indonesia pada era tersebut adalah generasi muda saat ini, sehingga di tengah sejumlah permasalahan kualitas pendidikan maupun dekadensi moral generasi muda, tenaga pendidik dan dituntut bekerja ekstra untuk meningkatkan kinerja pendidikan guna peningkatan kualitas sekaligus menguatkan karakter bangsa melalui peserta didik, terutama sejak masa pendidikan dasar.

Menanggapi permasalahan dan tantangan dunia pendidikan di atas, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan pedoman pendidikan nasional, guna memberikan arah pencapaian pendidikan yang berbasis karakter dan berbasis kinerja melalui

kurikulum 2013, yang pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Permendikbud No. 67 Tahun 2013). Berdasarkan telaah atas dasar dan tujuan kurikulum 2013 tersebut, maka kita dapat memahami bahwa pemerintah benar-benar menyadari perlunya mempersiapkan generasi muda penerus bangsa menuju kehidupan yang sejahtera dan bermartabat, sekaligus memiliki daya saing baik dalam tataran nasional maupun dalam menghadapi persaingan global. Bila apa yang dicita-citakan melalui kurikulum 2013 dapat terimplementasi dengan baik dalam tataran praktis, maka potensi SDM produktif Indonesia yang diperkirakan melipah pada era 2020-2035 dapat menjadi kekuatan utama bangsa dan negara dalam menghadapi kerasnya persaingan global. Namun, jika seandainya yang terjadi, maka potensi SDM yang besar tersebut justru akan menjadi beban negara sekaligus aktor perusak harkat dan martabat bangsa sebagaimana fenomena dekadensi moral yang mulai memperlihatkan bentuk nyata akhir-akhir ini. Pada tataran ini, Indonesia seharusnya merubah *mindset* basis keunggulan bangsa dan negara yang terfokus pada SDA menuju basis keunggulan yang terfokus pada optimalisasi potensi SDM. Hal ini berdasarkan teori kontemporer “*competitive advantage through human resources*”, bahwa hal utama yang menentukan keberhasilan suatu organisasi (termasuk negara) dalam memenangkan persaingan adalah manajemen sumber daya manusia sebagai basis keunggulan kompetitif (Bernardin dan Russell, 1998). Berdasarkan hal ini, maka kurikulum 2013 yang bertujuan untuk mewujudkan SDM yang berkarakter dan berdaya saing memiliki signifikansi, urgensi, relevansi, dan ketertarikan yang kuat untuk dikaji secara sistematis dan komprehensif.

Selanjutnya, telaah mengenai implementasi kurikulum 2013 berbasis kinerja dan karakter sangat menarik ditelaah dari kesiapan tenaga pendidik. Hal ini dikarenakan beberapa alasan mendasar. Pertama, secara filosofis, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan instrumen krusial dalam menuntun dan mengarahkan baik-tidaknya kualitas peserta didik dalam rangka mengembangkan SDM yang berkarakter dan berdaya saing sebagai basis keunggulan kompetitif Indonesia ke depannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan Dewantara (1961:20-22), bahwa pendidikan sifatnya hanya merupakan suatu “tuntunan” dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yang mengartikan bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kaum pendidik atau hidup dan tumbuh menurut kodratnya masing-masing. Namun, kaum pendidik tetap perlu menuntun atau mengarahkan kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya (bukan dasarnya) hidup dan tumbuhnya itu,

sebagaimana petani yang tidak mampu merubah kodrat padi menjadi jagung atau harus berbuah dalam waktu singkat, maupun tidak dapat memelihara padi sebagaimana memelihara tanaman lainnya. Kaum pendidik seperti petani hanya mampu memelihara tumbuh kembangnya tanaman tersebut yang sekalipun demikian tetap berfaedah, seperti jagung yang jatuh pada tanah yang baik, banyak airnya dan dapat sinar matahari, maka pemeliharaan dari petani tentu akan menambah baiknya tanaman itu. Sebaliknya, jikalau tidak ada pemeliharaan sedangkan keadaan tanahnya tidak baik, kekurangan air dan sinar matahari, maka walaupun dasarnya baik, maka biji jagung tersebut tidak akan dapat tumbuh dengan baik karena pengaruh keadaan. Bahkan sekalipun tidak baik dasarnya namun dipelihara dengan sebaik-baiknya, maka biji jagung tersebut dapat tumbuh lebih baik daripada biji jagung lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Dalam bahasa yang lain Kasali (2013) mengemukakan bahwa pendidikan dapat melahirkan *good passengers* (warga negara yang baik) dan *good driver* (pemimpin yang baik), namun dapat juga melahirkan *bad passengers* dan *bad driver*. Di sinilah letak signifikansi peran tenaga pendidik sebagai aktor dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis karakter dan kinerja sesuai dengan kurikulum 2013. Kedua, secara teoritik, implementasi suatu kebijakan atau program hanya dapat berhasil salah satunya apabila pelaksana kebijakan atau program memiliki kompetensi atau setidaknya memahami dengan baik tugas yang disyaratkan oleh kebijakan atau program tersebut (Korten, 1980; Albrecht dan Zemke dalam JICA, 2008). Berdasarkan asumsi filosofis dan teoritis di atas, maka menjadi menarik untuk menelaah kesiapan tenaga pendidik dalam hal pemahaman dan kompetensi yang dimiliki dikarenakan kedua hal ini sangat menentukan keberhasilan implementasi kurikulum 2013.

Menarik mencermati permasalahan di atas di lingkup daerah, mengingat kurikulum 2013 disusun oleh pemerintah pusat dengan tingkat partisipasi yang minim dari pemerintah daerah dalam penyusunannya. Dengan demikian, penelitian di lingkup daerah tentang hal ini dapat menggali aspirasi daerah sekaligus menjembatani aspirasi tersebut ke tingkat pusat, yang pada gilirannya memberikan sumbangsih yang besar bagi terbentuknya pola komunikasi yang sinergis antara pusat-daerah. Di satu sisi bagi pemerintah daerah, temuan penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan kajian guna evaluasi pemahaman dan kompetensi tenaga pendidik dalam rangka kesiapan implementasi kurikulum 2013; sementara di sisi lain bagi pemerintah pusat, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan guna pertimbangan kebijakan baik yang sifatnya strategis, taktis, maupun operasional terkait implementasi kurikulum 2013. Di sinilah salah satu letak kegunaan sekaligus sisi menarik penelitian ini.

Secara spesifik, menarik mencermati hal ini di Provinsi Gorontalo, mengingat dari sejumlah telaah statistik tentang kinerja pembangunan pendidikan berdasarkan misi 5K, pencapaian Provinsi Gorontalo selalu berada di bawah rata-rata pencapaian nasional, yang bila diperinci atas indikator ketersediaan layanan pendidikan (K1) Provinsi Gorontalo berada pada angka 72,45 di bawah rata-rata pencapaian nasional sebesar 80,20; indikator keterjangkauan layanan pendidikan (K2) Provinsi Gorontalo berada pada angka 83,79 di bawah rata-rata pencapaian nasional sebesar 92,37; indikator kualitas layanan pendidikan (K3) Provinsi Gorontalo berada pada angka 70,37 jauh di bawah rata-rata pencapaian nasional sebesar 96,35; indikator kesetaraan memperoleh layanan pendidikan (K4) Provinsi Gorontalo berada pada angka 90,93 sedikit di bawah pencapaian rata-rata nasional sebesar 91,78; dan atas indikator kepastian memperoleh layanan pendidikan (K5) Provinsi Gorontalo berada pada angka 89,06 di bawah rata-rata pencapaian nasional sebesar 91,40 (Kemdikbud, 2013). Selain itu, dari hasil penelusuran realitas teridentifikasi bahwa secara umum tenaga pendidik sekolah dasar di Provinsi Gorontalo merasa kesulitan, mengalami kesibukan yang luar biasa, dan bahkan merasa terbebani dengan kurikulum 2013, terutama dalam menyusun RPP dan menyiapkan variasi media pembelajaran, sebagai konsekuensi dari mengharapkan siswa aktif maka tenaga pendidik harus kreatif, sehingga terdapat kecenderungan yang besar bagi tenaga pendidik sekolah dasar di Provinsi Gorontalo untuk menolak menerapkan kurikulum 2013 tersebut. Dari hasil penelusuran, hal ini kurang lebih disebabkan sosialisasi kurikulum 2013 yang tergolong minim dan masih ada yang belum mengikuti diklat kurikulum 2013 di Provinsi Gorontalo, yang turut mempengaruhi tingkat pemahaman tenaga pendidik dan implementasi kurikulum 2013 (Hasil wawancara dan penilaian pada PLPG Tahun 2013, dalam hal ini peneliti termasuk dalam instruktur kegiatan tersebut). Sementara terkait dengan kompetensi tenaga pendidik yang disyaratkan guna mencapai keberhasilan implementasi kurikulum 2013, data statistik menunjukkan bahwa masih terdapat 57,29 % tenaga pendidik sekolah dasar di Provinsi Gorontalo yang berada pada kualifikasi di bawah S1 (Kemdikbud, 2013), yang turut memberikan sumbangsih atas permasalahan implementasi kurikulum 2013. Keseluruhan permasalahan yang teridentifikasi di Provinsi Gorontalo yang dikemukakan di atas kian menguatkan asumsi sebagian kalangan bahwa kurikulum 2013 hanya akan berakhir sebagai “kurikulum gagal”, sebagaimana nasib implementasi kurikulum-kurikulum sebelumnya. Namun, hal ini masih sebatas asumsi yang perlu diuji kebenarannya secara ilmiah, dan untuk itu penelitian ini dilakukan.

Di satu sisi kurikulum dapat terimplementasi dengan baik bila implementor, dalam hal ini tenaga pendidik memahami dengan baik kurikulum sekaligus memiliki kompetensi yang

disyaratkan untuk itu; sementara di sisi lain tenaga pendidik selaku implementor dihadapkan dengan sejumlah permasalahan miris pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas termasuk masalah keterlambatan pembayaran tunjangan guru triwulan I tahun anggaran 2014 sekaligus kekurangan pembayaran tunjangan tahun 2010-2013, yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus menjanjikan pengawalan penyaluran tunjangan tersebut (p2tkdikmen.kemdikbud.go.id, 8 April 2014). Berdasarkan hal ini, asumsi bahwa tenaga pendidik belum memiliki kesiapan yang baik dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 menjadi beralasan, mengingat fokus tenaga pendidik selaku implementor menjadi terbagi antara kesiapan implementasi kurikulum dengan permasalahan yang dihadapi, terutama tunjangan yang belum terbayarkan. Namun hal ini masih perlu diuji secara ilmiah.

Selanjutnya, implementasi kurikulum 2013 juga menghasilkan tantangan yang besar bagi implementor, terutama dalam hal tuntutan pemahaman yang tinggi atas kurikulum 2013, yang juga menuntut adaptasi terhadap perubahan *mindset* dan perubahan pendekatan ilmiah yang menekankan muatan karakter dalam setiap bidang studi. Mencermati hal ini maka belum dapat dipastikan apakah tenaga pendidik sekolah dasar di Provinsi Gorontalo bahkan di seluruh Indonesia memiliki kesiapan dalam hal pemahaman yang menyeluruh sebagaimana yang diharapkan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, bahkan diragukan bahwa tenaga pendidik mampu beradaptasi dengan perubahan *mindset* dan pendekatan yang ditekankan dalam kurikulum 2013. Hal ini juga didasarkan atas fakta bahwa mayoritas tenaga pendidik sekolah dasar di Indonesia berusia 41 tahun ke atas yakni sebesar 975.187 orang atau sebesar 62,90 %, yang secara rasional dapat diasumsikan sulit untuk melakukan perubahan bahkan cenderung untuk mempertahankan *status quo*. Hal ini sebagaimana hukum peningkatan konservatif dalam birokrasi, "*as bureau get older, the tend to become more conservative*" (Downs, 1967).

Belum genap setahun diimplementasikan, namun sejumlah pandangan negatif dan pesimistis akan keberhasilan implementasi kurikulum 2013 telah banyak merebak, bahkan disinyalir kemungkinan besar mengalami hambatan yang besar. Hal ini dapat ditelusuri dari pernyataan salah satu praktisi pendidikan Indonesia yang dimuat di salah satu media kenamaan Jakarta, yang menyebutkan bahwa:

“Permasalahan utama pendidikan di Indonesia adalah terkait distribusi, kualitas, dan kesejahteraan guru. Bila masalah ini diatasi, saya yakin kualitas pendidikan Indonesia akan semakin baik. Tapi kalau dibiarkan, mau kurikulumnya diganti atau bangunannya diperbaiki tetap saja tidak akan ada efeknya karena nomor satu yang harus diperbaiki adalah manusianya...Sayangnya fokus utama pemerintah saat ini adalah memperbaiki masalah yang ada di hulu seperti kurikulum atau undang-undang, sementara masalah di hilir yaitu guru tidak tersentuh. Penyesuaian kurikulum

memang penting, tapi yang lebih mendesak dan menjadi ujung tombaknya adalah menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan guru. Karena kurikulum yang bagus bisa tidak ada artinya bila disampaikan oleh guru dengan sederetan masalah yang dihadapinya”.

(Anis Baswedan, Rektor Universitas Paramadina, “*Guru, Kunci Utama Masalah Pendidikan di Indonesia*”, beritasatu.com, 16 Desember 2013)

Sejauh data, fakta, dan opini yang dikemukakan telah melatarbelakangi peneliti untuk mengeksplorasi implementasi kurikulum 2013 ditinjau dari kesiapan tenaga pendidik sekolah dasar di Provinsi Gorontalo, dalam suatu penelitian yang logis, terukur, sistematis, dan komprehensif. Bila temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga pendidik sekolah dasar di Provinsi Gorontalo telah memiliki kesiapan dalam arti memiliki pemahaman yang baik tentang kurikulum 2013, maka hal ini dapat menjadi rujukan daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama, dalam artian meningkatkan pemahaman tenaga pendidik di daerahnya demi keberhasilan implementasi kurikulum 2013, sekaligus sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam menentukan standar kesiapan tenaga pendidik dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan khususnya yang terkait dengan pemahaman kurikulum. Namun, bila hal sebaliknya yang justru terungkap dalam penelitian ini, maka hal ini dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah terkait kebijakan teknis operasional untuk mengatasi distorsi pemahaman tenaga pendidik sekolah dasar di Provinsi Gorontalo, sekaligus sebagai bahan rekomendasi kebijakan taktis bagi pemerintah pusat dan daerah guna mempersiapkan alternatif-alternatif apabila kurikulum 2013 tidak berhasil diimplementasikan, serta sebagai bahan rekomendasi kebijakan strategis dalam mengatasi permasalahan pendidikan khususnya tenaga pendidik, yang kesemuanya itu demi perbaikan kualitas pendidikan nasional menuju terwujudnya warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan sejumlah permasalahan yang teridentifikasi secara riil, baik dalam ranah pendidikan secara umum maupun yang secara spesifik dalam ranah implementasi kurikulum 2013 pada bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pemahaman tenaga pendidik tentang kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo ?
2. Bagaimana kesiapan tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ?

3. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasi kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pemahaman tenaga pendidik tentang kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo.
2. Kesiapan tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo dalam mengimplementasikan kurikulum 2013.
3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo.

D. Ruang Lingkup

Implementasi kebijakan/program pada dasarnya memiliki lingkup yang luas. Namun, dikarenakan implementasi kurikulum 2013 yang belum genap setahun, maka telaah mengenai implementasinya secara komprehensif belum dapat dilakukan, sehingga penelitian ini hanya terbatas pada deskripsi mengenai kondisi riil penerapan kurikulum 2013 di Provinsi Gorontalo saat ini. Selain itu, penelitian ini hanya dibatasi pada lingkup sekolah dasar. Terdapat sejumlah alasan mendasar mengapa penelitian ini dilakukan pada tingkatan ini. Pertama, sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang, bahwa pendidikan dasar khususnya sekolah dasar merupakan pondasi pendidikan nasional dikarenakan sekolah dasar merupakan jenjang awal penanaman nilai-nilai pendidikan berbasis karakter secara formal kepada anak-anak, atau dengan kata lain, sukses tidaknya nilai-nilai pendidikan berbasis karakter disosialisasikan pada peserta didik, sangat ditentukan oleh tahap ini. Kedua, jenjang sekolah dasar (SD) merupakan salah satu garis depan pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Meminjam pendekatan Ndraha (2003), bahwa kepercayaan konsumen terhadap suatu perusahaan tidak terbentuk pada saat iklan produknya dikeluarkan (ketika pejabat pidato) atau di kantor pusat perusahaan itu, melainkan ketika terjadi transaksi atau di tempat di mana jual beli tersebut dilakukan (di tempat di mana terjadi pelayanan publik dan pelayanan sipil), bahkan pada saat manfaat produk tersebut dirasakan masyarakat. Berdasarkan hal itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelayanan pendidikan sangat ditentukan oleh akuntabilitas garis depan pelayanan pendidikan,

yakni SD, SMP, dan SMA yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Ketiga, pemilihan SD sebagai lokus penelitian juga didasarkan pertimbangan teknis untuk mempersempit lingkup penelitian sehingga lebih terfokus dan mendalam, serta dikarenakan berbagai keterbatasan teknis peneliti. Selain itu, lingkup SD yang diteliti dibatasi pula pada SD yang berstatus negeri (SDN), dikarenakan kurikulum 2013 untuk jenjang SD baru diimplementasikan pada SDN.

Sebagai konsekuensi logis batasan lingkup penelitian pada jenjang SDN, maka term “tenaga pendidik” dalam penelitian ini juga terbatas pada guru. Memang dipahami, bahwa term pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional didefinisikan sebagai tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Namun khusus untuk SDN, term tenaga pendidik yang digunakan hanyalah guru, sehingga bila yang pada umumnya diacu oleh term tenaga pendidik dalam penelitian ini adalah guru. Selain itu, kesiapan tenaga pendidik dalam implementasi kurikulum 2013 juga menyangkut dimensi yang luas, sehingga perlu dibatasi pada tingkat pemahaman tenaga pendidik terhadap kurikulum 2013. Asumsi dasarnya adalah bila tenaga pendidik memahami dengan baik kurikulum 2013, maka kemungkinan besar kurikulum 2013 berhasil diimplementasikan pada jenjang SD Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, pemahaman tenaga pendidik yang komprehensif sangat menentukan berhasil tidaknya kurikulum 2013 diimplementasikan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi yang menggeluti bidang kajian kependidikan dan bidang disiplin ilmu sosial lainnya, terutama yang secara spesifik terkait dengan topik penelitian, yakni kurikulum. Selain itu, penelitian ini berisi data, fakta, konsep, dan teori yang diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan. Sebagai tambahan, kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan kajian, baik mengenai kurikulum 2013, pengembangan kurikulum, tenaga pendidik, sekaligus sebagai landasan bagi penelitian-penelitian lanjutan sehubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada stakeholder yang terkait dengan pengembangan kurikulum, baik di tingkatan pusat maupun daerah. Penelitian ini berisi deskripsi mengenai hal-hal yang telah terealisasi secara riil di Provinsi Gorontalo pada periode awal implementasi kurikulum 2013, sehingga diharapkan menjadi bahan evaluasi tahap awal bagi pemegang kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga (Disdikpora) Provinsi Gorontalo. Secara spesifik penelitian dapat mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini berisi kesiapan dalam hal pemahaman tenaga pendidik di SDN Provinsi Gorontalo tentang kurikulum 2013. Bila hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tenaga pendidik belum memahami dengan baik kurikulum 2013, maka bagi hal ini dapat menjadi bahan rekomendasi bagi Disdikpora Provinsi Gorontalo dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan kebijakan teknis operasional guna mengatasi ketimpangan pemahaman tersebut. Bila justru yang terungkap adalah kondisi sebaliknya, maka hal ini dapat menjadi rujukan daerah lainnya untuk menyamakan pemahaman tentang kurikulum 2013, dikarenakan kesepahaman tentang hal ini signifikan dalam menunjang implementasi kurikulum 2013 secara nasional dalam rangka perbaikan kualitas pendidikan.

Kedua, bila ternyata hasil penelitian mengungkapkan bahwa tenaga pendidik di SDN Provinsi Gorontalo belum memiliki kesiapan dalam hal pemahaman yang diharapkan dalam implementasi kurikulum 2013, maka hal ini dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan taktis, apakah yang berisi penundaan implementasi kurikulum 2013 di SDN Provinsi Gorontalo dan bagi daerah lainnya yang juga mengalami hal yang sama, ataukah alternatif-alternatif lain yang dipandang perlu dan dapat mengatasi permasalahan tersebut bila implementasi kurikulum 2013 tetap dipaksakan. Selain itu, bila ternyata hasil penelitian menemukan kecenderungan penolakan implementasi kurikulum 2013 yang dapat berujung kegagalan implementasi, maka diharapkan penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemegang kebijakan di tingkat pusat untuk mengevaluasi atau merevisi kurikulum 2013 agar lebih sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan kebutuhan daerah, baik tenaga pendidik secara khusus maupun masyarakat secara umum. Namun bila yang terungkap sebaliknya, maka hal ini dapat menjadi tolak ukur sekaligus motivasi bagi daerah lainnya dalam mengimplementasikan kurikulum 2013.

Ketiga, penelitian ini berisi mengenai telaah sejumlah faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat pemahaman tenaga pendidik tentang kurikulum 2013, baik yang teridentifikasi sebagai faktor pendukung maupun faktor penghambat implementasi kurikulum 2013. Berdasarkan hal itu, bila teridentifikasi sejumlah faktor yang mendukung implementasi

kurikulum 2013 bagi tenaga pendidik di SDN Provinsi Gorontalo, maka hal ini dapat menjadi sumbangsih bagi pemerintah untuk menerapkan sejumlah strategi guna meningkatkan pengaruh faktor yang mendukung demi pemahaman tenaga pendidik yang komprehensif tentang kurikulum 2013 tersebut. Sebaliknya, bila teridentifikasi sejumlah faktor yang menghambat, maka analisis atas hal ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan maupun langkah taktis bagi pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sekaligus bagi pemerintah pusat bila ternyata faktor yang menghambat tersebut merupakan kondisi yang dialami sejumlah daerah pada umumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Kurikulum.

Kurikulum dapat diartikan secara sempit atau luas. Dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah; sedangkan dalam pengertian luas kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa, selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah itu. Dengan pengertian luas ini berarti, segala usaha sekolah untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dalam usaha menghasilkan lulusan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tercakup dalam pengertian kurikulum (Soetjipto dan Kosasi, 2009:148).

Menurut Mulyadi (dalam Chamisijatin dkk., 2008:1-6), bahwa konsep kurikulum dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis pengertian. Pertama, kurikulum sebagai produk merupakan hasil perencanaan, pengembangan, dan perancangan kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum dalam arti produk merupakan hasil kongkrit yang dapat diamati dalam bentuk dokumen hasil kerja sebuah tim pengembangan kurikulum. Kedua, kurikulum sebagai program merupakan kurikulum yang berbentuk program-program pengajaran yang riil. Dalam bentuk yang ekstrim, kurikulum sebagai program dapat termanifestasikan dalam serentetan daftar pelajaran ataupun pokok bahasan yang diajarkan pada kurun waktu tertentu, seperti dalam kurun waktu satu semester. Ketiga, kurikulum sebagai hasil belajar yang ingin dicapai oleh para siswa, mendeskripsikan kurikulum sebagai pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, dan berbagai bentuk pemahaman terhadap bidang studi. Walau pengertian ini lebih konseptual, namun hasil belajar yang diinginkan siswa juga sering dituangkan dalam dokumen seperti halnya tujuan belajar, seperangkat konsep yang harus dikuasai, prinsip-prinsip belajar, dan sebagainya. Keempat, kurikulum sebagai pengalaman belajar, yang merupakan akumulasi pengalaman pendidikan yang diperoleh siswa sebagai hasil kegiatan belajar atau pengaruh situasi dan kondisi belajar yang telah direncanakan. Konsekuensinya apa yang direncanakan dalam kurikulum belum tentu berhasil sebagaimana yang diharapkan karena begitu banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti kemampuan guru dalam menerapkan dan mengembangkan kurikulum dalam proses pembelajaran. Artinya, sebaik apapun sebuah kurikulum bila tidak didukung oleh guru yang profesional tentu tidak banyak memberikan makna terhadap siswa; demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, kita mendapatkan pemahaman bahwa kurikulum mempunyai fungsi dan peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan; bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran; bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan; bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah; bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah; dan bagi siswa selaku subjek didik, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar yang memiliki fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, serta fungsi diagnostik (Tim Pengembang MKDP, 2011:9; Muzamiroh, 2013:20).

Sementara terkait dengan peranan kurikulum dalam pendidikan khususnya pendidikan formal, terdapat tiga peranan utama. Pertama, peranan konservatif, yang menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sarana mentransformasikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Kedua, peranan kreatif, yang menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masa sekarang serta masa yang akan datang. Ketiga, peranan kritis dan evaluatif, yang menekankan bahwa kurikulum tidak saja sekedar mewariskan nilai budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut, dalam hal ini kurikulum berperan sebagai kontrol atau sarana filterisasi sosial (Hamalik dalam Tim Pengembang MKDP, 2011:10; Muzamiroh, 2013:24).

Selanjutnya, kurikulum pada dasarnya terdiri dari sejumlah komponen. Secara sederhana, kebanyakan kurikulum mencakup tujuan, mata pelajaran, pengalaman pembelajaran, dan pendekatan penilaian; sementara beberapa kurikulum lainnya juga mencakup penilaian kebutuhan, rasional, sasaran/target, sarana/prasarana, bahan-bahan, serta diskusi tentang teori belajar dan teori pembelajaran (Yulaelawati, 2004:35). Menurut Sukmadinata (2008:102-113), suatu kurikulum terdiri dari sejumlah komponen. Pertama tujuan, yang mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya; tujuan ini dirumuskan atas dua hal, yakni perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat di satu sisi serta pemikiran-pemikiran yang terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis terutama falsafah negara di sisi lain. Kedua bahan ajar, yang terdiri dari topik dan sub topik, yang mengandung ide-ide pokok yang relevan dengan tujuan

yang telah ditetapkan. Ketiga strategi atau metode mengajar, yang disesuaikan dengan bahan ajar. Keempat media mengajar, yang merupakan segala macam bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar. Kelima evaluasi pengajaran, yang ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Keenam penyempurnaan pengajaran, yang merupakan umpan balik atas hasil evaluasi pengajaran, yang dilakukan demi penyempurnaan komponen-komponen dalam kurikulum.

Dalam pandangan yang tidak jauh berbeda, Hamid (2012:41-44), mengemukakan bahwa terdapat empat komponen kurikulum. Pertama komponen tujuan, yang berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Pada tingkat makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Tujuan kurikulum dapat diklasifikasikan dari tujuan yang paling umum hingga tujuan khusus yang dapat diukur yang dinamakan kompetensi. Kedua komponen isi atau materi pelajaran, yang merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Ketiga komponen metode atau strategi, meliputi rencana, metode, dan perangkat yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Keempat komponen evaluasi untuk melihat efektivitas atau keberhasilan pencapaian tujuan.

Berdasarkan keseluruhan tinjauan mengenai hakikat kurikulum di atas dan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, maka kurikulum dalam penelitian ini dipahami sebagai seperangkat dokumen tertulis hasil kesepakatan tim penyusun, pemegang kebijakan, dan masyarakat, yang berfungsi sebagai acuan bagi tenaga pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di sekolah, yang guna keberhasilan implementasinya maka tenaga pendidik selaku implementor harus memahami dengan baik komponen-komponen penyusun kurikulum tersebut. Dari definisi ini, maka nampak jelas bahwa tingkat pemahaman tenaga pendidik terhadap kurikulum 2013 yang menjadi salah satu permasalahan dalam penelitian ini, dapat dianalisis dari pemahaman tenaga pendidik terhadap sejumlah komponen yang terdapat dalam kurikulum 2013.

B. Tinjauan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar

Sebagai konsekuensi logis dari batasan lingkup penelitian pada tingkat SDN, maka pada bagian ini dikemukakan tinjauan kurikulum 2013 yang hanya memiliki relevansi dengan tingkatan SD. Selain itu, dalam keterkaitannya dengan tingkat pemahaman tenaga pendidik SDN yang merupakan salah satu permasalahan penelitian, maka sebagaimana yang

dikemukakan pada bagian hakikat kurikulum, fokus tinjauan ini ditekankan pada komponen-komponen kurikulum 2013 yang harus dipahami tenaga pendidik guna keberhasilan implementasinya, dalam hubungannya dengan sejumlah regulasi yang relevan.

Dalam Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, didapatkan bahwa kurikulum 2013 pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 pada dasarnya dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Secara spesifik, filosofi yang digunakan dalam kurikulum 2013 dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.
2. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain

mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum 2013 memosisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.

3. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (*essentialism*). Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama matapelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.
4. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (*experimentalism and social reconstructivism*). Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.

Selanjutnya, kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan sejumlah faktor. Pertama, tantangan internal dalam pendidikan nasional, antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.

Kedua, tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di *World Trade Organization* (WTO), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) Community, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas tekno-sains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi *International Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) dan *Program for International Student Assessment* (PISA) sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia.

Ketiga, penyempurnaan pola pikir. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir: (1) pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama; (2) pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/ media lainnya); (3) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet); (4) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains); (5) pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim); (6) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia; (7) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik; (8) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*); dan (9) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.

Keempat, penguatan tata kelola kurikulum. Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai daftar matapelajaran. Pendekatan Kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah diubah sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Oleh

karena itu dalam Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola: (1) tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif; (2) penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan (*educational leader*); dan (3) penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Kelima, penguatan materi yang dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik.

Lebih jauh, dalam regulasi tersebut didapatkan bahwa kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;
2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;
3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;
4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran;
6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
7. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antarmatapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

Pada dasarnya, Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Hal ini merupakan konsekuensi logis atas pendekatan teoritis yang menjadi dasar kurikulum 2013, yakni “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan

standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaran yang dilakukan guru (*taught curriculum*) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (*learned-curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.

Bila ditinjau dari standar nasional pendidikan, substansi perubahan yang terdapat dalam kurikulum 2013 hanya terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses, Standar Isi, dan Standar Penilaian. Masing-masing standar tersebut merupakan bagian dari 8 standar nasional pendidikan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang penjabarannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Masing-masing elemen perubahan dalam standar nasional pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai elemen perubahan pertama, dapat diartikan sebagai kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP No. 32 Tahun 2013). Pertama, dimensi sikap dengan kualifikasi kemampuan siswa yang memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kedua, dimensi pengetahuan dengan kualifikasi kemampuan siswa yang memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Ketiga, dimensi keterampilan dengan kualifikasi kemampuan siswa yang memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya (Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013).

Elemen perubahan kedua yakni standar isi, yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi mencakup kriteria ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang (PP No. 32 Tahun 2013).

Dalam regulasi lanjutan, yakni Permendikbud No. 64 Tahun 2013, dikemukakan bahwa standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada SKL, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.

Khusus untuk jenjang pendidikan SD, kompetensi yang dicapai berada pada tiga tingkatan, yakni tingkat I untuk kelas 1 dan 2, tingkat II untuk kelas 3 dan 4, serta tingkat III untuk kelas 5 dan 6. Sehubungan dengan hal ini, perlu ditekankan bahwa untuk tahun ajaran 2013/2014 jenjang pendidikan SD, kurikulum 2013 baru diimplementasikan pada kelas 1 dan 4, sehingga hanya tingkat kompetensi I dan II yang dikemukakan pada bagian ini berdasarkan pertimbangan relevansi dengan penelitian.

Dalam regulasi tersebut dikemukakan bahwa tingkat kompetensi I (kelas 1 dan 2) mencakup dimensi: pertama sikap spiritual, yang dideskripsikan sebagai sikap menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya serta sikap sosial, yang dideskripsikan sebagai sikap menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru; kedua dimensi pengetahuan, yang dideskripsikan sebagai kompetensi dalam memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah; ketiga dimensi keterampilan, yang dideskripsikan sebagai kompetensi dalam menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sementara tingkat kompetensi II

mencakup: pertama sikap spiritual, yang dideskripsikan sebagai sikap menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya serta sikap sosial, yang dideskripsikan sebagai sikap menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan **tetangganya**; kedua dimensi pengetahuan, yang dideskripsikan sebagai kompetensi dalam memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan **tempat bermain**; ketiga dimensi keterampilan, yang dideskripsikan sebagai kompetensi dalam menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, **sistematis**, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

Bila kita hanya menelaah tingkat kompetensi beserta deskripsinya, maka kemungkinan besar kita berpendapat bahwa antara tingkatan kompetensi I dan II pada SD hanya terdapat perbedaan yang sederhana, sebagaimana yang nampak dalam sejumlah poin yang ditebalkan di atas. Namun, tidak demikian halnya jika memperluas tinjauan pada keterkaitan antara masing-masing tingkat kompetensi dengan ruang lingkup materinya, yang dalam hal ini ditekankan bahwa untuk tingkat kompetensi yang berbeda menuntut pembelajaran dan penilaian dengan fokus dan penekanan yang berbeda pula. Semakin tinggi tingkat kompetensi, semakin kompleks intensitas pengalaman belajar peserta didik dan proses pembelajaran serta penilaian, yang mana hal ini dapat ditelusuri pada sejumlah ruang lingkup materi untuk masing-masing tingkat kompetensi. Selain itu, hal ini juga berdasarkan ketentuan bahwa dari tingkat kompetensi tersebut ditetapkan kompetensi yang bersifat generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi yang bersifat spesifik dan ruang lingkup materi untuk setiap muatan kurikulum. Secara hirarkis, kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kompetensi yang bersifat generik pada tiap tingkat kompetensi. Kompetensi yang bersifat generik ini kemudian digunakan untuk menentukan kompetensi yang bersifat spesifik untuk tiap muatan kurikulum. Selanjutnya, Kompetensi dan ruang lingkup materi digunakan untuk menentukan kompetensi dasar pada pengembangan kurikulum satuan dan jenjang pendidikan.

Elemen perubahan ketiga yakni standar proses sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013, dapat diartikan sebagai kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan yang mengacu pada SKL dan standar isi, yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Terhadap hal-hal yang menjadi

cakupan standar proses, hanya perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil, yang secara langsung dilakukan oleh tenaga pendidik pada tingkat SD. Pertama terkait dengan perencanaan pembelajaran, tenaga pendidik tidak lagi dibebankan untuk menyusun silabus dan bahan ajar, tinggal menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan, berdasarkan ketentuan dalam kurikulum 2013. Kedua pelaksanaan pembelajaran, yang terkait dengan: (1) kegiatan pendahuluan, yakni aktivitas yang dilakukan guru terkait persiapan pembelajaran, mulai dari persiapan psikis dan fisik siswa, memberikan motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang ingin dicapai, serta menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus; (2) kegiatan inti, yang merupakan aktivitas penggunaan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran; dan (3) kegiatan penutup, yakni aktivitas refleksi yang dilakukan guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok, baik untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh guna secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas baik tugas individual maupun kelompok, dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Ketiga penilaian hasil dan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*), yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effect*) dan dampak pengiring (*nurturant effect*) dari pembelajaran. Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*), pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.

Elemen perubahan terakhir yakni standar penilaian sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013, merupakan kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria (PAK), yang merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses.

Khusus untuk kompetensi sikap, pendidik melakukan penilaian melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat”(peer evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik: (1) Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati; (2) Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. (3) Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik; (4) Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.

Khusus untuk kompetensi pengetahuan, pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan: (1) Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran; (2) Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan; (3) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Sementara untuk kompetensi keterampilan,

pendidik menilai melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang dilengkapi rubrik: (1) Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi; (2) Proyek adalah tugas-tugas belajar (*learning tasks*) yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu; (3) Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya.

Berdasarkan keseluruhan tinjauan mengenai kurikulum 2013 di atas, dapat ditarik suatu garis pemahaman, bahwa kurikulum 2013 dikembangkan dari nilai-nilai dan budaya bangsa sebagaimana yang dituangkan dalam falsafah NKRI, sekaligus mengakomodir sejumlah tantangan, tuntutan, serta kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah penyesuaian terhadap standar nasional pendidikan, terutama atas standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan standar penilaian.

C. Hakikat Tenaga Pendidik

Pada bagian ini akan dikemukakan tinjauan mengenai hakikat tenaga pendidik, mulai dari definisi hingga keterkaitan perannya dengan kurikulum dalam pendidikan. Selain itu perlu ditekankan kembali sebagaimana pada bagian ruang lingkup, bahwa konsekuensi batasan penelitian pada tingkat SD mengakibatkan tenaga pendidik hanya didefinisikan sebagai guru, sehingga bila ditemukan term “tenaga pendidik” pada tinjauan ini, maka yang dirujuk oleh term tersebut adalah “guru”.

Dalam falsafah pendidikan yang dibangun Ki Hadjar Dewantara, jabatan, kedudukan, atau status tenaga pendidik yang melekat pada diri seseorang bukanlah perkara yang sederhana. Seorang tenaga pendidik dalam falsafah ini tidak saja harus menguasai pengetahuan yang dinamakan “ilmu pendidikan”; tidak saja harus menguasai ilmu yang berkaitan dengan syarat-syarat pendidikan yakni psikologi, fisiologi, etika atau moral, estetika, dan ikhtisar cara-cara pendidikan; tetapi juga kepribadian yang dilandasi tanggung jawab yang tinggi selaku pendidik yang mampu memberikan teladan, tuntutan, dan dorongan (Dewantara,

1962); yang kesemuanya itu menempatkan tenaga pendidik pada posisi yang mulia dalam kehidupan. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan apa yang dikemukakan (Saudagar dan Idrus, 2009:98-99), bahwa jabatan tenaga pendidik bukan hanya menuntut kemampuan spesialisasi tenaga pendidik dalam arti menguasai pengetahuan akademik dan kemahiran profesional yang relevan dengan bidang tugasnya sebagai tenaga pendidik, tetapi juga tingkat kedewasaan dan tanggung jawab serta kemandirian yang tinggi dalam mengambil keputusan. Kemampuan-kemampuan itu membuat tenaga pendidik memiliki nilai lebih dan kewibawaan yang tinggi terhadap peserta didik yang diajarnya. Sesuai dengan nilai sosial budaya kita, secara historis kedudukan tenaga pendidik itu tinggi dalam masyarakat kita. Tenaga pendidik adalah seorang yang patut dipatuhi, ditiru (diteladani) kata dan perbuatannya. Motif utama menjadi tenaga pendidik bukan imbalan gaji (kebendaan), tetapi adalah panggilan (*calling*) untuk mengabdikan kepada Tuhan, masyarakat, dan kemanusiaan.

Dalam perkembangan pemahaman mengenai tenaga pendidik, seringkali kita mempertukarkan antara term “tenaga pendidik” dengan term “guru”. Pada dasarnya pemahaman yang demikian tidaklah keliru. Secara definisi kata “guru” bermakna sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. Akan tetapi, sesungguhnya guru dan pendidik merupakan dua hal yang bisa berbeda maknanya. Kata pendidik (bahasa Indonesia) merupakan padanan dari kata *educator* (bahasa Inggris). Di dalam kamus *Webster* kata *educator* berarti *educationist* atau *educationalist* yang padanannya dalam bahasa Indonesia adalah pendidik, spesialis di bidang pendidikan, atau ahli pendidikan. Kata guru (bahasa Indonesia) merupakan padanan dari kata *teacher* (bahasa Inggris). Di dalam kamus *Webster*, kata *teacher* bermakna sebagai “*the person who teach, especially in school*” atau guru adalah seseorang yang mengajar, khususnya di sekolah (Danim dan Khairil, 2010:5).

Dalam pengertian yang lain, guru dikenal dengan *al-mu'alim* atau *al-ustadz* dalam bahasa Arab, yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim. Artinya, guru adalah seseorang yang memberikan ilmu. Pendapat klasik mengatakan bahwa guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar (hanya menekankan satu sisi; tidak melihat sisi lain sebagai pendidik dan pelatih). Namun, pada dinamika selanjutnya definisi guru berkembang secara luas. Guru disebut pendidik profesional karena guru itu telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak. Guru juga dikatakan sebagai seseorang yang memperoleh

Surat Keputusan (SK), baik dari pemerintah atau swasta untuk melaksanakan tugasnya, dan karena itu memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah (Suprihatiningrum, 2013:23).

Sebagai seorang profesional, pendidik memiliki ciri-ciri seperti yang dikembangkan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (dalam Syaifuddin, 2007:5-4): (1) memiliki fungsi dan signifikansi sosial; (2) memiliki keahlian dan ketrampilan tingkat tertentu; (3) memperoleh keahlian dan ketrampilan melalui metode ilmiah; (4) memiliki disiplin ilmu; (5) memiliki latar pendidikan perguruan tinggi; (6) memiliki etika profesi yang dikontrol organisasi profesi; (7) bebas memutuskan sendiri dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pekerjaannya; (8) mempunyai nilai sosial di masyarakat; (9) berhak mendapatkan imbalan yang layak.

Tuntutan profesionalisme di atas kemudian dituangkan secara spesifik dalam prinsip profesi guru, yakni bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (Undang-Undang No. 14 Tahun 2005).

Selanjutnya, telaah mengenai sejumlah regulasi di Indonesia juga memberikan pemahaman mengenai perkembangan definisi mengenai tenaga pendidik dan guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga Pendidik dipahami sebagai tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan regulasi tersebut, nampak bahwa guru hanyalah salah satu jenis kualifikasi dari tenaga pendidik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, didapatkan pemahaman bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam regulasi ini juga dipahami bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, yang ditujukan untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, maka tidak keliru pemahaman yang menyamakan antara tenaga pendidik dengan guru, dikarenakan kedudukan guru sebagai pendidik profesional.

Dalam regulasi lainnya, yakni PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, didapatkan pemahaman bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Regulasi ini kian memperjelas bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara term tenaga pendidik dengan term guru, khususnya dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.

Berdasarkan hal di atas, maka term guru tetap dapat dipertukarkan dengan tenaga pendidik dalam konteks tertentu terutama dalam tingkatan sekolah dasar yang menjadi lokus penelitian ini, sehingga tidak menjadi permasalahan berarti bila selanjutnya hanya term “guru” yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini juga ditujukan agar dimensi guru yang khamaompleks, tidak terdistorsi dengan penyempitan makna yang dialami oleh term “pendidik”, sebagaimana yang nampak dalam sejumlah regulasi di atas, bahwa “mendidik” hanya merupakan salah satu tugas profesional guru, selain mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Dengan demikian, penggunaan term guru untuk selanjutnya diharapkan dapat menjaga pemahaman mengenai term guru secara komprehensif, sekaligus menjadikan uraian lebih spesifik.

Tidak sampai di situ saja, perkembangan mengenai definisi tenaga pendidik dan guru di atas juga menyebabkan perkembangan dalam pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada profesinya. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 dikemukakan bahwa pendidik berhak memperoleh: (1) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas

dan memadai; (2) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (3) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; (4) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan (5) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sementara pendidik berkewajiban: (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Hak dan kewajiban tenaga pendidik dalam regulasi di atas mengalami perkembangan ke arah kompleksitas, ketika guru pada gilirannya dipahami sebagai pendidik profesional. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dikemukakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: (1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; (2) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (3) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; (5) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; (6) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; (7) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; (8) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; (9) memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; (10) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau (11) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Sementara dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: (1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (3) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (4) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan (5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Adanya perkembangan pemahaman mengenai definisi, kedudukan, hak, dan kewajiban guru di atas pada dasarnya dikarenakan kompleksitas dimensi hakikat jabatan guru itu sendiri. Djumiran dkk. (2009:1-18), mengemukakan bahwa jabatan guru pada dasarnya melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti batang tubuh ilmu khusus, memerlukan pendidikan/pelatihan yang lama, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjadikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, menentukan standarnya sendiri, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, serta memberikan layanan dibidang pembelajaran, bimbingan, administrasi, kesehatan sekolah, dan ekstra kurikuler. Kompleksitas yang terdapat dalam jabatan guru sebagaimana yang tergambar di atas, kian mempertegas pemahaman bahwa untuk menjadi guru tidaklah semudah yang dibayangkan, karena untuk menjadi guru, seseorang harus mampu mengemban tanggung jawab yang tinggi dalam membentuk kualitas pendidikan generasi muda penerus bangsa yang berkarakter dan berdaya saing.

Hal di atas memberikan kita pemahaman bahwa guru pada hakikatnya merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif. Setiap usaha peningkatan mutu pendidikan seperti perubahan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, dan penyediaan sarana-prasarana akan berarti apabila melibatkan guru (Saudagar dan Idrus, 2009:85). Berdasarkan hal ini, maka guru diposisikan sebagai garda terdepan dan sentral dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Berkaitan dengan itu, maka guru akan menjadi bahan pembicaraan banyak orang, dan tentunya tidak lain berkaitan dengan kinerja dan totalitas dedikasi serta loyalitas pengabdianya. Sorotan tersebut lebih bermuara kepada ketidakmampuan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga bermuara pada menurunnya mutu pendidikan. Kalaupun sorotan itu lebih mengarah pada sisi-sisi kelemahan guru, dan mungkin ada sistem yang berlaku, baik sengaja ataupun tidak akan berpengaruh terhadap permasalahan tadi. Banyak hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan, bagaimana kinerja guru akan berdampak kepada pendidikan bermutu. Melihat sisi lemah dari sistem pendidikan nasional, dengan gonta-ganti kurikulum pendidikan, maka secara langsung atau tidak akan berdampak kepada guru itu sendiri, sehingga perubahan kurikulum dapat menjadi beban psikologis bagi guru, dan mungkin juga akan dapat membuat guru frustrasi akibat perubahan tersebut. Hal ini sangat dirasakan oleh guru yang memiliki kemampuan minimal, dan tidak demikian halnya guru profesional (Fathurrohman dan Suryana, 2012:29-30).

Sebagai salah satu bidang yang menuntut profesionalisme yang tinggi, peran guru bersifat multidimensional, yang mana guru menduduki peran sebagai: (1) orang tua; (2) pendidik atau

pengajar; (3) pemimpin atau manajer; (4) produsen atau pelayan; (5) pembimbing atau fasilitator; (6) motivator atau stimulator; (7) peneliti atau narasumber. Peran tersebut dapat bergradasi menurun, atau tetap sesuai dengan jenjang tuntutananya (Tampubolon dalam Suprihatiningrum, 2013:27). Hal ini pada dasarnya sejalan dengan penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang peran guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah yakni sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Berdasarkan sejumlah telaah di atas, nampak jelas signifikansi guru dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun, dalam menjalankan perannya sebagai agen pembelajaran, guru tetap harus dituntun oleh suatu pedoman guna mengarahkan kesatuan pembelajaran demi pencapaian tujuan pendidikan nasional, dalam hal ini diperlukan suatu kurikulum. Keterkaitan antara guru dengan kurikulum merupakan keterkaitan mutual; di satu sisi kurikulum berguna sebagai pedoman guru dalam penyelenggaraan aktivitas belajar-mengajar; dan di sisi lain, agar kurikulum benar-benar berfungsi sebagai pedoman yang memberikan kesatuan arah pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka peran guru selaku implementor menjadi signifikan.

Dalam konteks kontemporer, peran guru selaku implementor kian krusial, mengingat sering terjadinya perubahan kurikulum pendidikan nasional; bahkan belum sempurna suatu kurikulum terimplementasi secara luas dan komprehensif, justru telah digantikan oleh kurikulum yang baru, seperti yang terjadi saat ini yakni kurikulum 2013 telah menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang diakui mayoritas belum sempat terimplementasi secara luas dan komprehensif. Kondisi ini tentu membutuhkan kesiapan guru yang mampu memahami dengan baik mengenai urgensi suatu kurikulum, termasuk muatan-muatan yang tertuang dalam kurikulum baru tersebut. Hal ini signifikan, mengingat bila guru tidak mampu memahami dengan baik urgensi perubahan kurikulum sekaligus muatan-muatannya, maka perubahan kurikulum hanya menjadi hal yang sia-sia, sehingga kurikulum baru tersebut tidak terimplementasi dengan baik, yang pada gilirannya menghambat kesatuan arah penyelenggaraan pendidikan nasional dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Hargreaves dan Sarason (dalam Suprihatiningrum, 2012:18), bahwa perubahan kurikulum akan berhasil apabila guru mau berubah. Hal ini mengindikasikan bahwa berhasilnya perubahan kurikulum tergantung pada kemauan dan kemampuan guru dalam menangkap perubahan yang terjadi dan kemudian melaksanakannya.

Di dalam pelaksanaan kurikulum tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok (dapat dengan sesama guru di satu sekolah, dengan guru di sekolah lain atau dengan kepala sekolah dan personel pendidikan lain seperti pengawas). Tentunya agar tugas ini dapat terlaksana dengan baik, maka guru yang bersangkutan harus memahami dengan baik kurikulum tersebut. Pada titik ini, pemahaman tentang administrasi pengembangan kurikulum akan sangat membantu guru dalam menerjemahkan kurikulum menjadi pengalaman belajar siswa (Soetjipto dan Kosasi, 2009:146-149). Namun ironisnya, di tengah berbagai perubahan kurikulum yang telah dilalui, kualitas pendidikan nasional tetap menjadi pertanyaan yang mendasar. Hal ini secara implisit menegaskan bahwa permasalahan mendasar pendidikan nasional kita bukanlah terletak pada kurikulum, melainkan terletak pada guru selaku aktor yang mengimplementasikan kurikulum tersebut.

Guru, di tengah kondisi perubahan kurikulum justru berhadapan dengan sejumlah permasalahan kronis, diantaranya beragamnya kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan; guru tidak layak mengajar; belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru; pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan; guru belum profesional; kesejahteraan guru yang belum memadai; dan masih terbatasnya lembaga penjamin mutu guru (Fathurrohman dan Suryana, 2012; Suprihatiningrum, 2012). Mencermati hal tersebut, maka dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pemerintah seharusnya tidak saja memfokuskan perhatiannya pada perubahan kurikulum guna menjawab sejumlah tantangan yang ada, tetapi juga perlu memfokuskan perhatiannya dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi guru, sehingga reformasi pendidikan yang dicita-citakan dapat dicapai secara simultan; tidak secara parsial.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat ditarik suatu garis pemahaman bahwa pada hakikatnya guru selaku tenaga pendidik memiliki peran signifikan dan krusial dalam penyelenggaraan pendidikan. Khusus keterkaitannya dengan kurikulum, maka dibutuhkan guru yang mampu memahami dengan baik urgensi, signifikansi, dan substansi dari suatu kurikulum, sehingga guru dapat menerjemahkan dengan baik kurikulum tersebut dalam proses belajar-mengajar, yang pada gilirannya mengarahkan pengalaman belajar siswa dalam kesatuan arah pencapaian tujuan pendidikan nasional.

D. Tinjauan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Tenaga Pendidik Tentang Kurikulum

Pada bagian ini akan dikemukakan sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman tenaga pendidik tentang kurikulum. Dalam penelitian ini, pada dasarnya sejumlah faktor yang dianggap berpengaruh akan ditelusuri dan berkembang dalam proses penelitian. Namun, dalam rangka memberikan pemahaman awal mengenai sejumlah faktor berpengaruh yang kemungkinan ditemukan di lapangan penelitian, maka dipandang perlu untuk mengkaji hal tersebut terlebih dahulu. Adapun sejumlah faktor berpengaruh tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Kualifikasi Akademik Tenaga Pendidik

Kualifikasi akademik pada dasarnya dipahami sebagai ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan, yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2008). Khusus untuk tingkat guru SD yang menjadi objek penelitian, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi perguruan tinggi yang terakreditasi (UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2005; Permendiknas No. 16 Tahun 2007; PP No. 74 Tahun 2008).

Kualifikasi akademik dalam bentuk ijazah, pada dasarnya merefleksikan kemampuan yang dimiliki guru bersangkutan sesuai dengan bidang kepakaran yang ditunjukkan dalam ijazah tersebut. Dengan dimilikinya ijazah yang sesuai dengan bidang ilmu yang disyaratkan bagi guru SD, maka diasumsikan bahwa guru yang bersangkutan mampu memahami dengan dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan bidang pendidikan khususnya pendidikan dasar, yang termasuk di dalamnya pemahaman tentang kurikulum SD. Disadari, kondisi demikian tidak selamanya ditemukan dalam realitas; bisa jadi ada guru dengan strata S3 justru memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap kurikulum; begitupun sebaliknya, guru dengan tingkat strata S1 justru mampu memahami kurikulum dengan baik. Hal ini secara mendasar wajar dalam pendidikan, terlebih sejak awal kita telah memahami bahwa pendidikan dalam diri manusia inheren dan sifatnya sepanjang hayat (*long life learning*); atau dengan kata lain, pengetahuan seseorang tentang sesuatu hal apakah terkait pemahamannya tentang kurikulum atau hal lainnya, secara substansial lebih ditentukan oleh proses

pembelajaran yang dilaluinya selama hidup ketimbang melalui bukti fisik ijazah yang bersangkutan.

Penelitian Hartini (2005) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman guru SMK Putra Tama Bantul Yogyakarta terhadap kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dapat menjadi contoh hal ini. Dari penelusuran data penelitian dengan kuisioner, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan *chi square*, didapatkan bahwa tidak ada pengaruh positif tingkat pendidikan terhadap pemahaman guru tentang KBK (X^2 hitung $< X^2$ Tabel), yang secara kualitatif dapat dipahami bahwa pemahaman guru tentang KBK tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan guru yang bersangkutan, apapun tingkat stratanya.

Keseluruhan hal di atas memberikan kita pemahaman bahwa kualifikasi akademik bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan tingkat pemahaman guru terhadap kurikulum (namun kualifikasi akademik yang dibuktikan dengan ijazah tersebut tetap memiliki relevansi, karena tetap dijadikan standar dalam profesi atau pekerjaan apapun termasuk guru). Masih ada sejumlah faktor lainnya, seperti kompetensi yang dimiliki guru, sebagaimana yang dapat diuraikan sebagai berikut.

2. Kompetensi Tenaga Pendidik

Dalam penelusuran sejumlah sumber didapatkan bahwa untuk menjadi guru yang kompeten/berkualitas, guru yang bersangkutan harus memiliki kompetensi inti yang disyaratkan, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Saudagar dan Idrus, 2009; Sagala, 2011; Saondi dan Suherman, 2012; Suprihatiningrum 2013). Kompetensi yang dimiliki guru ini pada gilirannya menentukan proses penyelenggaraan pendidikan, salah satunya yang berkaitan dengan implementasi kurikulum. Dengan kompetensi yang mumpuni, diasumsikan bahwa guru yang bersangkutan mampu memahami dengan baik kurikulum yang menjadi pedoman aktivitas belajar-mengajar di sekolahnya.

Dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2005, kompetensi pada dasarnya dapat diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik; Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi

teladan peserta didik; Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam; dan Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Dalam PP No. 74 Tahun 2008, ditekankan bahwa kompetensi guru bersifat holistik, yang berarti kompetensi yang terintegrasi dan terwujud dalam kinerja guru. Secara rinci kompetensi pedagogik merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; pemahaman terhadap peserta didik; pengembangan kurikulum atau silabus; perancangan pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; pemanfaatan teknologi pembelajaran; evaluasi hasil belajar; dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang: beriman dan bertakwa; berakhlak mulia; arif dan bijaksana; demokratis; mantap; berwibawa; stabil; dewasa; jujur; sportif; menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun; menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik; bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Berdasarkan telaah di atas, kita memahami bahwa kompetensi baik pedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesional signifikan bagi setiap guru dalam menyelenggarakan pendidikan. Dari hal di atas pula, dapat dilihat bahwa bila guru memiliki kompetensi yang disyaratkan tersebut, maka pemahaman terhadap kurikulum bukanlah hal yang perlu dipertanyakan,

mengingat substansi yang dimiliki setiap kurikulum pasti relevan dengan kompetensi yang disyaratkan kepada setiap guru selaku implementor. Namun, hal ini masih sebatas asumsi dasar yang masih perlu diuji secara ilmiah, dan inilah salah satunya yang ingin diungkap dalam penelitian ini.

Lebih jauh, permasalahan mendasar dalam keterkaitannya dengan kompetensi guru di sini adalah tidak adanya alat ukur yang akurat untuk menentukan apakah guru yang bersangkutan telah memiliki kompetensi yang diharapkan, sebagaimana permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya pada bagian tinjauan mengenai hakikat tenaga pendidik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kompetensi guru hanya ditelusuri melalui “sertifikasi guru”. Hal ini atas asumsi dasar bahwa untuk mendapatkan status “tersertifikasi”, maka guru yang bersangkutan harus lolos uji kompetensi yang disyaratkan dalam proses sertifikasi guru tersebut; sehingga, status “tersertifikasi” atau “belum tersertifikasi” dapat digunakan sebagai instrument untuk mengetahui apakah guru yang bersangkutan memiliki kompetensi yang disyaratkan. Selain itu, sertifikasi guru juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui kompetensi guru dikarenakan hal ini juga dijadikan standar pemerintah nasional dalam menguji apakah guru yang bersangkutan kompeten atau tidak, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

3. Karakteristik Tenaga Pendidik

Karakteristik secara sederhana dapat dimaknai sebagai ciri khas, sifat, atau watak yang melekat pada sesuatu. Dalam keterkaitannya dengan guru, karakteristik yang dimaksud seperti usia, jenis kelamin, pengalaman (lama mengajar), status guru apakah PNS, honorer, guru bantu/kontrak, dan sebagainya. Keterkaitannya dengan tingkat pemahaman terhadap kurikulum, karakteristik guru juga dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Dalam hal usia, guru pada tingkat usia lanjut misalnya cenderung untuk tidak mengindahkan kurikulum dikarenakan sejumlah faktor, apakah telah terbiasa dengan kurikulum lama, kemampuan adaptasi menurun, terlanjur merasa nyaman dengan kondisi yang ada sehingga cenderung mempertahankan *status quo*, dan sebagainya yang turut menghambat implementasi kurikulum baru; di sisi lain, guru pada tingkat usia muda cenderung mudah memahami suatu kurikulum dikarenakan masih memiliki waktu yang lama dalam beradaptasi, masih suka dengan tantangan, masih memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri, dan sebagainya, yang turut mendukung implementasi kurikulum; guru dengan jenis kelamin laki-laki secara psikologis cenderung rasional dalam memahami

kurikulum; pengalaman mengajar juga sangat membantu seseorang dalam memahami kurikulum, terutama apabila yang bersangkutan telah terbiasa dengan pergantian kurikulum; bahkan status guru turut menentukan tingkat pemahaman, seperti guru kontrak yang cenderung tidak mengindahkan kurikulum dikarenakan perhatiannya lebih banyak tersita untuk memikirkan nasibnya yang belum menjadi PNS, ketimbang memikirkan kurikulum yang menurutnya tidak relevan dengan statusnya.

4. Sosialisasi Kurikulum

Sosialisasi dalam Kamus Bahasa Indonesia bermakna proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya; ataukah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; atau pemasyarakatan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008). Dari pemaknaan di atas, maka jelaslah bahwa sosialisasi apakah terkait kebijakan/program khususnya kurikulum pendidikan sangat penting, agar apa yang disosialisasikan tersebut dikenal, dipahami, dan dihayati, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik oleh implementor.

Dalam realitas, banyak ditemukan kasus bahwa guru kurang memahami kurikulum hanya karena permasalahan sosialisasi yang kurang, terutama guru-guru yang berada di pelosok. Bahkan, guru-guru yang mendapatkan sosialisasi apakah melalui diklat, workshop, seminar, forum diskusi ilmiah, media cetak, media elektronik, internet dan sebagainya belum tentu memahami dengan baik suatu kurikulum, apalagi bagi yang tidak mendapatkan sosialisasi. Sekalipun demikian, sosialisasi kurikulum pendidikan tetap signifikan guna memasyarakatkan kurikulum, sehingga kurikulum mudah dipahami dan dihayati, sehingga dapat diimplementasikan secara berhasil.

E. Kerangka Pikir

Dari serangkaian uraian dalam penelitian ini, perlu kiranya diberikan suatu gambaran alur penelitian dengan model “kerangka pikir” guna memudahkan baik peneliti maupun pembaca memahami arah penelitian ini. Kerangka ini didesain untuk mengetahui kondisi riil penerapan kurikulum 2013 di SDN Provinsi Gorontalo; mengetahui, mengukur, dan menganalisis tingkat pemahaman tenaga pendidik di SDN Provinsi Gorontalo tentang kurikulum 2013; serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman tenaga pendidik tentang kurikulum 2013.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, bahwa kurikulum 2013 belum genap setahun diimplementasikan, sehingga yang dapat ditelaah dari dimensi implementasinya hanyalah deskripsi mengenai kondisi riil penerapannya saat ini di SDN Provinsi Gorontalo. Sementara terkait dengan variabel tingkat pemahaman tenaga pendidik di SDN Provinsi Gorontalo, dari tinjauan mengenai kurikulum 2013 tingkat SD didapatkan sejumlah hal harus dipahami dengan baik oleh tenaga pendidik agar kurikulum 2013 berhasil diimplementasikan, sekaligus dijadikan indikator atas variabel tersebut. Adapun indikator atas variabel tingkat pemahaman tenaga pendidik di SDN Provinsi Gorontalo tentang kurikulum 2013 dapat dioperasionalkan sebagai berikut.

1. Tujuan Kurikulum, yakni tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui implementasi kurikulum 2013, yang dirumuskan di atas landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan yuridis. Tenaga pendidik harus memahami indikator ini dengan baik, agar penyelenggaraan aktivitas belajar-mengajar sesuai dengan arah yang ditentukan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum 2013.
2. Rasionalisasi Kurikulum, urgensi dan signifikansi kurikulum 2013. Urgensi dapat dioperasionalkan sebagai alasan rasional yang mendesak, sehingga perlu dilakukan perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013, baik atas sejumlah tantangan internal, tantangan eksternal, dan penyempurnaan pola pembelajaran yang mendesak perubahan/penyesuaian kurikulum yang berlaku. Signifikansi dapat dioperasionalkan sebagai alasan rasional mengapa suatu kurikulum penting bagi tenaga pendidik. Kedua hal ini, baik urgensi dan signifikansi yang merupakan sub indikator dari rasionalisasi kurikulum harus dipahami dengan baik oleh tenaga pendidik, demi keberhasilan implementasi kurikulum 2013.
3. Elemen Perubahan Standar Nasional Pendidikan, yakni sejumlah elemen dari delapan standar nasional pendidikan yang mengalami perubahan/penyesuaian, yang terdiri dari standar kompetensi kelulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Tenaga pendidik harus mampu memahami dengan baik masing-masing elemen standar perubahan ini, sehingga proses belajar-belajar mengajar yang dilakukan sesuai dengan ketentuan standar tersebut, yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kurikulum 2013, demi mencapai tujuan pendidikan nasional.

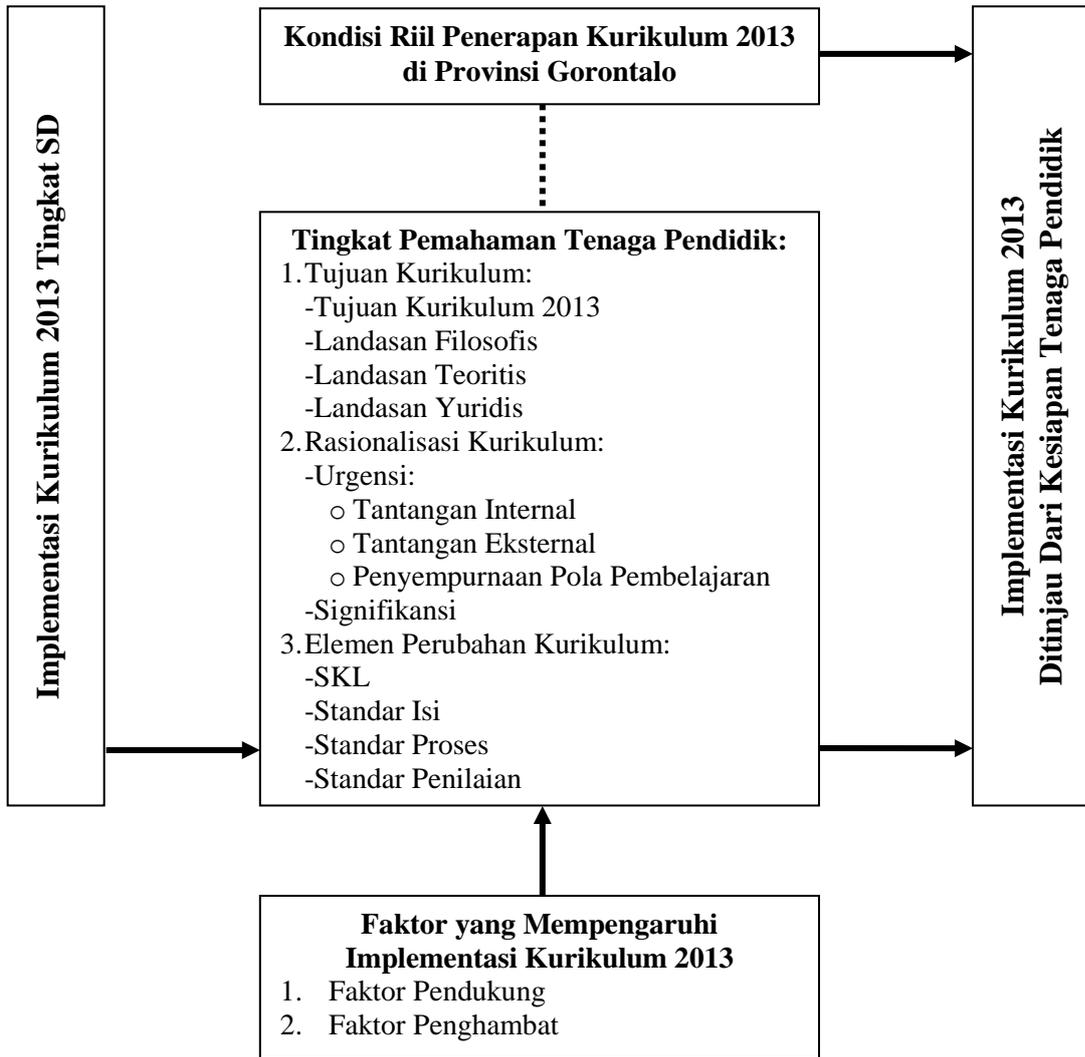
Selanjutnya, atas variabel faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman tenaga pendidik di SDN Provinsi Gorontalo, pada dasarnya ditelusuri secara mendalam di lapangan penelitian. Hal ini selain untuk menjaga bias yang dapat ditimbulkan bila peneliti menentukan terlebih dahulu sejumlah faktor yang berpengaruh, juga agar telaah mengenai

faktor-faktor berpengaruh benar-benar sesuai dengan kondisi riil yang dialami tenaga pendidik di SDN Provinsi Gorontalo dalam kerangka implementasi kurikulum 2013.

Sejumlah variabel penelitian, baik kondisi riil implementasi, tingkat pemahaman tenaga pendidik, maupun faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman tenaga pendidik tersebut, pada dasarnya memiliki keterkaitan. Secara inheren, kondisi riil penerapan implementasi kurikulum 2013 dapat mencerminkan tingkat pemahaman tenaga pendidik di SDN Provinsi Gorontalo, dikarenakan apa yang dipahami oleh tenaga pendidik tersebut lah yang mereka terapkan dalam aktivitas belajar-mengajar di SD dalam kerangka implementasi kurikulum. Selain itu, dari kondisi riil tersebut juga dapat ditelusuri faktor-faktor baik yang mendukung maupun yang menghambat, sehingga kondisi riil implementasi kurikulum 2013 terjadi sebagaimana yang dideskripsikan. Hal ini yang menyebabkan mengapa kondisi riil implementasi kurikulum 2013 saat ini perlu dideskripsikan terlebih dahulu, baru kemudian kita menganalisis tingkat pemahaman beserta faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun suatu alur kerangka pikir yang disesuaikan untuk keperluan penelitian. Variabel kondisi riil implementasi kurikulum 2013 ditelusuri melalui observasi secara langsung di lapangan dan telaah dokumen yang terkait dengan kondisi riil tersebut; variabel tingkat pemahaman tenaga pendidik tentang kurikulum 2013 dianalisis berdasarkan dimensi yang ditelusuri dalam tinjauan kurikulum 2013, yang terdiri dari tujuan, rasionalisasi kurikulum, dan elemen perubahan kurikulum; serta sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman tenaga pendidik yang ditelusuri secara langsung dan berkembang di lapangan penelitian; yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Latar Penelitian

Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Sekolah Dasar Negeri Se Provinsi Gorontalo yang menjadi lokasi penelitian mencakup lima Kabupaten – satu Kota yang menjadi sasaran /pilot proyek implementasi kurikulum 2013 yang terdiri dari: Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo. Penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan lokus penelitian Kabupaten – Kota Gorontalo.

Pertama. Kabupaten Gorontalo adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Gorontalo, Pulau Sulawesi yang merayakan hari jadinya setiap tanggal 26 November 1673 atau 16 Syakban 1084 Hijriah. Kabupaten Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi dengan ibu kota semula Isimu. Pada tahun 1978 ibu kota Kabupaten Gorontalo dipindahkan ke Limnboto. Sejak ditetapkan sebagai Kabupaten hingga sampai tahun 2011 Kabupaten Gorontalo sudah mengalami tiga kali proses pemekaran: (1) tahun 1999 yang melahirkan Kabupaten Boalemo, (2) tahun 2003 melahirkan Kabupaten Bone Bolango dan (3) tahun 2007 melahirkan Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut).

Letak Kabupaten Gorontalo terletak pada posisi diantara 00.24' - 10.02 Lintang Utara (LU) dan 121².59" – 123⁰.32 Bujur Timur (BT) dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara	Laut Sulawesi
Selatan	Teluk Tomini
Barat	Kabupaten Boalemo
Timur	Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Bolaang Mongondow

Sekolah Dasar Negeri yang menjadi sasaran di Kabupaten Gorontalo terdiri dari lima sekolah yakni sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Jumlah Guru		Ket
		Kelas I	Kelas IV	

1.	SD Negeri 7 Tibawa	1	1	2
2.	SD Negeri 8 Tibawa	1	1	2
3.	SD Negeri 12 Tibawa	1	1	2
4.	SD Negeri 14 Tibawa	1	1	2
5.	SD Negeri Tabongo	1	1	2
	Jumlah Total	5	5	10 orang

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi guru sasaran untuk kelas I sejumlah 5 orang dan guru kelas IV sejumlah 5 orang, total 10 orang.

Kedua. Kabupaten Boalemo dengan ibu kota Tilamuta merupakan Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo pada tahun 1999. Kabupaten Boalemo dibentuk pada tanggal 12 Oktober tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo.

Kabupaten Boalemo terletak pada posisi diantara $00^{\circ} 24' 04''$ – $01^{\circ} 02' 30''$ Lintang Utara (LU) dan $120^{\circ} 08' 04''$ – $122^{\circ} 33' 33''$ Bujur Timur (BT) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Laut Sulawesi
Selatan	Teluk Tomini
Barat	Kabupaten Pohuwato
Timur	Kabupaten Gorontalo

Sekolah Dasar Negeri yang menjadi sasaran di Kabupaten Boalemo terdiri dari lima sekolah yakni sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Jumlah Guru		Ket
		Kelas I	Kelas IV	
1.	SD Negeri Tilamuta	2	2	4
2.	SD Negeri 15 Tilamuta	1	1	2
3.	SD Negeri 2 Paguyaman	1	1	2
4.	SD Negeri 7 Paguyaman	1	2	3
5.	SD Negeri 8 Paguyaman	1	1	2
	Jumlah Total	6	7	13 orang

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi guru sasaran untuk kelas I sejumlah 6 orang dan guru kelas IV sejumlah 7 orang sehingga totalnya 13 orang.

Ketiga. Kabupaten Bone Bolango adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo tahun 2003. Pada waktu dimekarkan Kabupaten Bone Bolango hanya terdiri atas empat wilayah Kecamatan , yaitu: Bonepantai, Kabila, Suwawa, dan Tapa (<http://www.bonebolangokab.go.id/09/02/2014>).

Kabupaten Bone Bolangi sampai saat ini (september 2011) mengalami banyak proses pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan, sehingga jumlah kecamatan dan desa/kelurahan menjadi banyak, yaitu 17 kecamatan dan 1 kecamatan persiapan (wilayah Pinogu, CS) 152 desa dan 4 kelurahan.

Sekolah Dasar Negeri yang menjadi sasaran di Kabupaten Bone Bolango terdiri dari lima sekolah yakni sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Jumlah Guru		Ket
		Kelas I	Kelas IV	
1.	SD Negeri Ayula	1	1	2
2.	SD Negeri 8 Kabila Bone	1	1	2
3.	SD Negeri 1 Bone	1	1	2
4.	SD Negeri 5 Bulango Selatan	1	1	2
5.	SD Negeri 3 Bulango Timur	1	1	2
Jumlah Total		5	5	10 orang

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi guru sasaran untuk kelas I sejumlah 5 orang dan guru kelas IV sejumlah 5 orang, total 10 orang.

Keempat. Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Gorontalo. Ibu kotanya adalah ini merupakan Kwandang. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2007. Pada tanggal 2 Januari 2007 Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ketiga dari Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas 11 kecamatan, dan 123 desa dengan jumlah penduduk 104.133 jiwa (data SP 2010) serta luas 1.230,07 km², sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 84.60 jiwa/km². Secara geografis batas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) adalah sebagai berikut:

Utara Laut Sulawesi

Selatan Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango

Barat Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah

Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara

Sekolah Dasar Negeri yang menjadi sasaran di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) terdiri dari lima sekolah yakni sebagai berikut:

No.	Nama Sekolah	Jumlah Guru		Ket
		Kelas I	Kelas IV	
1.	SD Negeri 2 Ponelo	1	1	2
2.	SD Negeri 1 Deme	1	1	2
3.	SD Negeri 2 Titidu	1	1	2
4.	SD Negeri 2 Leboto	2	1	3
5.	SD Negeri 1 Molinggapoto	2	1	3
	Jumlah Total	7	5	12 orang

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi guru sasaran untuk kelas I sejumlah 7 orang dan guru kelas IV sejumlah 5 orang, dengan total 12 orang.

Kelima. Kabupaten Pohuwato adalah Kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Boalemo. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, ditandai dengan pelantikan Drs. Jahja K Nasib sebagai pejabat Bupati Pohuwato.

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut antara lain disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Pohuwato yang mempunyai luas wilayah $\pm 6.761,67 \text{ km}^2$ perlu dibentuk Kabupaten Pohuwato yang terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Popayato, Kecamatan Lemito, Kecamatan Randangan, Kecamatan Marisa, dan Kecamatan Paguat dengan luas wilayah keseluruhan $\pm 4.244,31 \text{ km}^2$. Dalam Undang-Undang tersebut juga dikemukakan bahwa ibu kota kabupaten Pohuwato berkedudukan di Marisa (Pasal 8 ayat 2), ([www.gorontalo-info](http://www.gorontalo-info.megsfree/kab-pohuwato.html) megsfree/kab-pohuwato, html /09/02/2014). Kabupaten Pohuwato yakin dan mempersiapkan daerah ini menjadi lumbung pangan Provinsi Gorontalo di bagian barat di masa depan.

Sekolah Dasar Negeri yang menjadi sasaran di Kabupaten Pohuwato terdiri dari tiga sekolah yakni sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Jumlah Guru		Ket
		Kelas I	Kelas IV	
1.	SD Negeri 2 Botubilotahu	3	2	5
2.	SD Inpres Banuroja	1	1	2
3.	SD Negeri 1 Marisa Selatan	2	2	4
Jumlah Total		6	5	11 orang

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi guru sasaran untuk kelas I sejumlah 6 orang dan guru kelas IV sejumlah 5 orang, dengan total berjumlah 11 orang

Keenam. Kota Gorontalo adalah Ibu Kota Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kota Gorontalo lahir pada hari kamis, 18 Maret 1728 M atau bertepatan dengan kamis, 06 Syakban 1140 Hijriah, tepatnya tanggal 16 Februari 2001 . Kota Gorontalo secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo (UU No.38 Tahun 2000 pasal 7). Kota Gorontalo memiliki luas wilayah 66,25 km² (0,55% dari luas Provinsi Gorontalo dan berpenduduk sebanyak 180.127 jiwa berdasarkan data SP 2010) dengan tingkat kepadatan penduduk 2.718 jiwa/km², (id.wikipedia.org/wiki/kota.gorontalo/09/02/2014).

Kota Gorontalo ini memiliki motto “ Adat Bersendikan Syara’ , Syara’ Bersendikan Kitabullah” sebagai pandangan hidup masyarakat yang memadukan adat dan agama. Kota Gorontalo merupakan salah satu Kota tertua di Sulawesi selain Kota Makassar, Pare-Pare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu di Ternate, Gorontalo, Bone.

Seiring dengan penyebaran agama Islam Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondow, Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (Bagian Selatan) dan Laut Sulawesi (Bagian Utara).

Secara geografis, Kota Gorontalo terletak antara 00^o28’17” – 00^o 35’56” Lintang Utara (LU) dan 122^o 59’ 44” – 123^o 05’ 59” Bujur Timur (BT), batas-batas dari wilayah Kota Gorontalo ini adalah sebagai berikut:

Utara

Kabupaten Bone Bolango

Selatan	Teluk Tomini
Barat	Kabupaten Gorontalo
Timur	Kabupaten Bone Bolango

Sekolah Dasar Negeri yang menjadi sasaran di Kota Gorontalo terdiri dari lima sekolah yakni sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Jumlah Guru		Ket
		Kelas I	Kelas IV	
1.	SD Negeri 102 Kota Utara	1	1	2
2.	SD Negeri 82 Kota Tengah	2	2	4
3.	SD Negeri 85 Kota Tengah	2	2	4
4.	SD Negeri 93 Sibatana	1	2	3
5.	SD Negeri 17 Kota Barat	1	1	2
6.	SDN 24 Duingi	1	1	2
7.	SDN 30 Kota Selatan	4	3	7
8.	SDN 33 Kota Selatan	2	2	4
9.	SDN 46 Hulontalo	2	3	5
10.	SDN 61 Kota Timur	3	2	5
11.	SDN 77 Kota Tengah	1	1	2
12.	SDN 80 Kota Tengah	1	2	3
Jumlah Total		21	22	43 orang

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi guru sasaran Kota Gorontalo untuk kelas I sejumlah 21 orang dan guru kelas IV sejumlah 22 orang, dengan total 43 orang.

B. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Satori dan Komariah (2009) bahwa pendekatan kualitatif adalah mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar melalui kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data yang relevan diperoleh dari situasi yang alamiah. Melalui pendekatan kualitatif ini penelitian implementasi kurikulum 2013 ditinjau dari kesiapan tenaga pendidik

di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo akan terungkap secara sistematis dan dapat mengakomodir semua masukan atau informasi dari lapangan.

Penerapan pendekatan kualitatif oleh peneliti bertujuan untuk menggali informasi secara langsung dari responden yang dianalisis secara ilmiah mengenai implementasi kurikulum 2013 ditinjau dari kesiapan tenaga pendidik Provinsi Gorontalo, dengan harapan merubah mind set guru yang telah mengikuti sosialisasi atau diklat kurikulum 2013. Tujuan yang mendasar adalah untuk mengembangkan kemampuan profesionalisme guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

C. Populasi dan Sampel

Berdasarkan data Kemendikbud tentang detail sekolah sasaran SDN di Provinsi Gorontalo (kurikulum.kemdikbud.go.id), didapatkan bahwa SDN sasaran di Provinsi Gorontalo untuk tahun ajaran 2013/2014 berjumlah 35 SDN. Dari data tersebut pula, didapatkan bahwa jumlah populasi tenaga pendidik yang mengimplementasikan kurikulum 2013 sebanyak 56 orang untuk kelas 1 dan 52 orang untuk kelas 4, sehingga total populasi berjumlah 108 orang tenaga pendidik. Berdasarkan hal itu, maka dilakukan penarikan sampel jenuh, sehingga keseluruhan populasi menjadi sampel penelitian, atau dengan kata lain, jumlah sampel yang dijadikan responden penelitian ini berjumlah 108 orang yang sama dengan jumlah keseluruhan populasi. Dengan demikian, maka diharapkan data penelitian lebih valid, reliabel, obyektif, dan komprehensif dikarenakan tingkat representativitas sampel terhadap populasi tidak perlu dipertanyakan lagi.

Ternyata setelah ditemukan di lapangan, jumlah populasi sekolah sasaran tidak sesuai dengan data di atas, yang pada awalnya kelas paralel ternyata tidak lagi, sementara awalnya yang tidak paralel ternyata ditemukan paralel, sehingga hal ini dapat mengurangi jumlah responden. Sekolah sasaran tetap sejumlah 35 SD, namun jumlah tenaga pendidik (guru) berkurang, totalnya hanya 98 orang.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, sejumlah teknik/instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Telaah Dokumen

Teknik ini mengidentifikasi sejumlah dokumen/arsip-arsip yang dimiliki baik oleh pemerintah pusat terutama Kemendiknas maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo,

khususnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian, yakni terkait dengan implementasi kurikulum 2013 dan guru SDN.

b. Kuisisioner

Dalam teknik ini diformulasi sejumlah butir pertanyaan maupun pernyataan sesuai indikator penelitian yang kemudian diminta kepada responden untuk memberikan tanggapannya. Kuisisioner dibuat dalam daftar pertanyaan tertutup dan terbuka, dalam hal ini responden memberikan jawaban/tanggapan terhadap sejumlah pertanyaan/ Pernyataan yang telah dirumuskan dalam instrumen. Masing-masing instrumen diberi kode untuk memudahkan peneliti mengidentifikasi sumber informasi sekaligus disesuaikan dengan indikator-indikator dalam penelitian.

- c. Wawancara : penggunaan metode ini ditujukan untuk menggali informasi secara lebih mendalam terkait permasalahan penelitian. Terkait penelitian, peneliti menggunakan metode *indept interview*, dalam hal ini peneliti dan informan/responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti tidak menyusun suatu pedoman wawancara khusus, melainkan butir pertanyaan wawancara termasuk dalam satu instrument yang digunakan secara bersama untuk mendapatkan data kualitatif.
- d. Observasi: Dilakukan dengan cara melihat secara langsung tentang permasalahan yang berhubungan dengan variabel penelitian dan melakukan pencatatan atas hasil observasi. Sesuai dengan jenisnya, peneliti memilih *Observasi dengan partisipasi terbatas*, yakni peneliti terlibat hanya terbatas pada aktivitas obyek yang mendukung data penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Adapun analisis deskriptif yang digunakan mengacu pada teknik Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2013:113) sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan untuk kemudian ditentukan mana data yang diperlukan dan mana data yang tidak diperlukan. Reduksi adalah bagian analisis, berbentuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan.

b. Display Data

Display adalah usaha untuk mengorganisir data sesuai dengan instrument yang digunakan serta indikator yang dinilai. Sajian data sebaik-baiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, jaringan kerja dan kajian kegiatan sehingga memudahkan peneliti mengambil keputusan.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah teknik penarikan kesimpulan atau penafsiran terhadap data yang telah terkumpul dan telah organisir. Kesimpulan merupakan sebahagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Sebagai peneliti yang bisa menjaga kebenaran dari segala data yang diperoleh maka peneliti menjadwalkan dalam penelitiannya setelah data-data tersebut dianalisis dan dilakukan pengecekan dari awal sampai akhir dengan berkunjung kembali ke tempat penelitian dan memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan data atau melacak kesesuaian data hasil penelitian.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap - tahap penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Peneliti melapor dan meminta rekomendasi atau permohonan pengumpulan data dari Balihristi Provinsi Gorontalo dalam rangka penelitian deskriptif kualitatif.
2. Peneliti membuat jadwal penelitian
3. Peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penelitian berupa pedoman wawancara dan kuisisioner bagi pejabat instansi yang terkait maupun kepala sekolah dan para guru kelas I dan IV di SDN Provinsi Gorontalo (Lima Kabupaten – satu Kota Gorontalo) yang menjadi sasaran kurikulum 2013
4. Peneliti melakukan observasi awal terlebih dahulu.
5. Peneliti mewawancarai dan merekam semua kegiatan yang dilakukan.
6. Peneliti bersama anggota mengedarkan kuisisioner kepada semua guru sasaran
7. Peneliti mengumpul segala data dan menganalisisnya.
8. Peneliti menguraikan data - data tersebut dalam bentuk tulisan laporan penelitian.
9. Peneliti mengecek kembali keabsahan data yang diperoleh selama penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Observasi Awal

Observasi awal tentang implementasi Kurikulum 2013 yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati kegiatan diklat para guru SD kelas I, II, IV dan V di SDN 2 Kabila Kabupaten Bone Bolango yang diselenggarakan dengan dana APBD dan di SDN 61 Kota Timur Kota Gorontalo yang diselenggarakan dengan biaya APBN selama lima hari. Dari kesan peserta dalam diklat tersebut terungkap bahwa kurikulum 2013 sepertinya diimplementasikan secara terburu-buru. Awalnya peserta tidak paham dan justru bingung dengan kurikulum 2013. Namun setelah mengikuti pelatihan, kebingungan tersebut lama-kelamaan semakin berkurang.

Kegiatan diklat tersebut dilaksanakan oleh LPMP yang bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Bone Bolango, yang utamanya ditujukan bagi para guru SD kelas I, II, IV dan V. Adapun peserta diklat yang sempat diwawancarai, antara lain Rustam Daulima, yang mengemukakan bahwa kurikulum 2013 lebih baik dibanding dengan kurikulum sebelumnya yakni KTSP, karena K-13 dengan sistem pembelajaran tematiknya langsung menyentuh pada diri siswa, sehingga membuat mereka lebih kreatif; hal inilah yang turut menyebabkan kami selaku guru sangat senang menerapkannya. Selain itu, peneliti didampingi oleh anggota peneliti, yakni Hamka A. Husain, yang dari pengamatannya memberikan pemahaman bahwasanya peserta diklat sangat aktif, bersemangat, dan antusias dalam mengerjakan tugas (Observasi 04 Juli 2014).

Observasi lanjutan dilaksanakan pada kegiatan PLPG Tahap I dengan UKA 47 ke atas, yang pesertanya mewakili sepuluh Kabupaten/Kota dari Gorontalo dan Sulawesi Utara (delapan rombel). Tahap II dengan UKA 37 ke bawah (tujuh rombel). Tahap III dengan UKA 32 ke bawah sampai 15 (enam rombel). Adapun kegiatan PLPG ini dilaksanakan di SMP Negeri 1

Telaga Kabupaten Gorontalo, yang dimulai dari tanggal 2 Agustus s/d 2 September 2014. Setiap tahap kegiatan PLPG ini berlangsung sembilan hari.

Hasil observasi awal mensinyalir bahwa KTSP belum selesai/belum tuntas dilaksanakan, lantas muncul kurikulum 2013. Bahkan hadirnya kurikulum 2013 kian membuat bingung para guru sebagai pelaksana pembelajaran di kelas. Namun berkat sosialisasi dan diklat yang diikuti, masalah ini sedikit banyak dapat teratasi. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan hasil wawancara dengan peserta PLPG Universitas Negeri Gorontalo, yang mengesankan bahwa kurikulum 2013 dilaksanakan secara terburu-buru.

Lebih jauh. Dalam diklat tersebut, peserta PLPG mengemukakan bahwa awalnya mereka tidak paham dengan kurikulum 2013 sehingga mengalami kebingungan dalam mengimplementasikannya. Bahkan, terdapat beberapa peserta yang baru melihat kurikulum dan bukunya saat kegiatan PLPG, yang kemudian memahami bahwa kurikulum 2013 nampaknya berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yakni KTSP dan KBK. Setelah mengikuti diklat K-13, peserta justru mengemukakan bahwa mereka senang dan paham bahwa kurikulum 2013 merupakan pengembangan, pelengkap, atau penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Namun, terdapat pula permasalahan yang mereka hadapi terutama yang berkaitan dengan penyusunan perangkat pembelajaran khususnya instrumen penilaian (Ujar Peserta PLPG tanggal 02 Agustus 2014).

b. Wawancara

Adapun hasil wawancara mendalam dengan sejumlah pejabat dari instansi terkait, dapat dikemukakan sebagaimana berikut:

1. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo (DIKBUDPORA)

Kegiatan wawancara dilakukan dengan Bapak Drs. H. Yahya Ichsan, M.A selaku Sekretaris Dinas Dikbudpora, yang pada dasarnya merespon dengan baik implementasi kurikulum 2013. Beliau mengemukakan bahwa implementasi kurikulum 2013 merupakan hal baru yang harus dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah pusat saat ini fokus pada upaya agar semua sekolah dapat melaksanakan K-13 untuk tahun ajaran baru, yang mulai dijalankan dari SD Kelas I, IV, II, V; SMP Kelas VII, VIII; serta SMA/SMK Kelas X dan XII. Terkait hal ini, pemerintah pusat telah mengambil sejumlah langkah dan pendekatan agar daerah memiliki kesiapan dalam melaksanakan kurikulum 2013 tersebut. Dengan adanya semangat dari pemerintah pusat, tentunya kita di daerah melalui LPMP, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota menyambut dengan baik kurikulum 2013 dan

memang sudah sepatutnya melaksanakannya dengan ketersediaan hal-hal yang diperlukan, yang utamanya adalah guru sasaran. Apakah mereka benar-benar sudah mengikuti diklat atau bimtek? Apakah sekolah-sekolah sudah siap melaksanakannya? Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo (Dinas Dikbudpora) dalam hal implementasi kurikulum 2013, mengambil peran untuk mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis. Namun kalau kegiatan diklat, tentu saja KORnya adalah LPMP; Tegas Sekretaris Dinas Dikbudpora Provinsi di ruang kerja (04 Juli 2014 pk 08.30).

Selanjutnya Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Dr. H. Weni Liputo, MM menyatakan bahwa untuk tahun ajaran 2014/2015, semua tingkat kelas pada jenjang tertentu sudah melaksanakan Kurikulum 2013 dari SD sampai SMA/SMK. Terkait guru SD, baik pegawai negeri maupun tenaga honor, sudah memiliki kompetensi dan pemahaman yang sama tentang Kurikulum 2013, sehingga pelatihan harus dilaksanakan secara *massif* agar semuanya bisa ter-*cover*.

Khusus untuk Sekolah Dasar atau \pm 1450 orang yang belum teranggarkan, hal ini sementara diupayakan, baik melalui anggaran pusat maupun dengan mengoptimalkan anggaran kolaborasi pemerintah Kabupaten-Kota Gorontalo, yang diharapkan dapat tertuntaskan dengan baik. Hal yang menjadi permasalahan terkait dengan pendampingan, dalam hal ini dikhawatirkan bahwa sekolah-sekolah yang jauh dan gurunya relatif terbatas akan mengalami kekosongan kelas pada saat mengikuti pelatihan, sehingga proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal (Wawancara Selasa, 08 Juli 2013 pk 14.15).

2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo (LPMP)

LPMP saat ini sedang gencar melaksanakan diklat di beberapa tempat, antara lain di SDN 2 Kabila Kabupaten Bone Bolango dan SDN 61 Kota Timur Kota Gorontalo yang berlangsung selama lima hari dengan biaya APBN maupun biaya mandiri (APBD), yang kemudian akan dilanjutkan lagi di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut). Kegiatan ini dilaksanakan secara kontinu guna merespon kebijakan pemerintah pusat sekaligus menyahuti implementasi kurikulum 2013 yang diterima dan dipahami secara merata di semua jenjang pendidikan, khususnya di Provinsi Gorontalo (Wawancara dengan Kasubag Umum, Bpk. Eky Aristanto.P. Punu, SE,MM diruang kerjanya 04 Juli 2014 pk 09.30).

3. Walikota Gorontalo

Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini wakil Walikota Bapak dr. Charles Budi Doku, menyatakan apresiasinya terhadap pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur terkait empat program yang dilaksanakan: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Infrastruktur, dan (4) Ekonomi Kerakyatan. Khusus untuk pendidikan, saya atas nama pemerintah kota akan mengecek implementasi kurikulum 2013 melalui penelitian, yang kemudian hasilnya akan dikaji lagi, karena sebaiknya setiap program harus diteliti dulu supaya tidak mubazir (Ujar Wawali Kota Gorontalo, 04 Juli 2014, pk 11.00).

4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang diwakili Sekretarisnya Bapak Yanson, mengemukakan bahwa tidak ada permasalahan bagi Dinas Pendidikan Kota dalam hal implementasi kurikulum 2013, sebagaimana hal ini sudah dirintis oleh Pejabat Wali Kota Gorontalo Bapak Dr.H. Weni Liputo, MM. Bahkan, saat ini Kadis Kota Gorontalo Drs. Beni idrus, M.Pd, telah menyatakan secara tegas bahwa jika ada guru yang tidak mengimplementasikan kurikulum 2013, maka beliau mempersilahkan untuk mencari sekolah yang tidak ada kurikulum 2013. Motivasi dari Dinas Kota Gorontalo merupakan pelecut bagi semua guru dalam membenahi diri dan merubah *mindset* sesuai dengan perkembangan yang ada (Wawancara Rabu, 23 Juli 2014).

5. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Bapak Indra Yasin, SH, MH, di ruang kerjanya, menyambut baik tentang implementasi Kurikulum 2013 ini, karena hal ini adalah kepentingan pendidikan secara nasional dan sudah menjadi kebijakan nasional, demi mencerdaskan kehidupan bangsa, mau tidak mau haruslah dilaksanakan. Beliau mengemukakan sangat antusias untuk memberikan kontribusi terhadap kesuksesan pelaksanaan Kurikulum 2013 yang diterapkan secara nasional disesuaikan dengan kemajuan masa kini agar tidak ketinggalan negara ini. Bupati Indra Yasin , SH,MH menyatakan bahwa tidak ada masalah untuk Gorontalo Utara, ujarnya (Selasa 08 Juli 2014).

6. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Kepala Dinas yang diwakili Korwas Bapak Hamka Manoppo di ruang kerjanya sangat optimis dengan implementasi Kurikulum 2013 ini, karena untk merubah mind set guru dilakukan sosialisasi dan diklat di semua jenjang baik yang didanai oleh APBN maupun oleh APBD. diharapkan diklat Kurikulum 2013 ini selesai seluruhnya tanggal 14 Juli 2014, dan buku yang menjadi pendukung dalam pembelajaran sudah dipesan, semoga

cepat sampai, sehingga tahun ajaran baru sudah dapat dilaksanakan secara baik tuturnya (08 Juli 2013).

7. Kepala daerah Kabupaten Gorontalo

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo wakil Bupati Bapak Tonny Yunus , S.Kom, MA di ruang kerjanya mengemukakan bahwa dampak sekolah gratis membuat orang tua acuh tak acuh dalam menyekolahkan anaknya. Jadi bukan merupakan beban lagi apakah anak ini belajar atau tidak. Tanggapan wakil bupati sekolah di Indonesia dan di luar negeri sangat berbeda, karena di Indonesia terlalu banyak mata pelajaran yang kegiatannya banyak menghapal. Namun dengan adanya implementasi Kurikulum 2013 semoga kegiatan pembelajaran lebih baik , berkarakter, dan anak-anak tidak terbebani banyak mata pelajaran (08 Juli 2013 pk 12.00).

8. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo

Kepala Dinas diwakili sekretaris Dinas Pendidikan Bapak Drs. Yasin Alitu, M.Pd di ruang kerjanya menyatakan bahwa implementasi Kurikulum 2013 sepertinya tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Kepala Sekolah, Pengawas, maupun para guru kelas I dan Kelas IV khususnya jenjang Sekolah Dasar sudah mengikuti pelatihan yang diawali dengan sosialisasi untuk seluruh jenjang , jadi begitu mereka mengikuti Diklat tidak merasa kaget dengan Kurikulum 2013. Permasalahan sekarang adalah buku belum ada , baik buku pedoman Guru maupun paket siswa (wawancara 08 Juli 2014).

9. Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango

Pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango Bapak Hamim Pou, S.Kom, MH mengemukakan bahwa dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 perlu banyak sosialisasi yakni pembelakan kepada para guru, karena hal ini hal yang baru, haruslah diadakan pelatihan dua kali lipat untuk menunjang ke 45 Indonesia Emas. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sangat merespon dan mensupport implementasi Kurikulum 2013 ini dengan spontan menyatakan dengan menyiapkan anggaran untuk itu. Jadi tidak ada masalah dengan anggaran, pemerintah Bone Bolango lebih dahulu melaksanakan Diklat Implementasi Kurikulum denngan dana APBD, tandas Bupati (wawancara 23 Juli 2014).

10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Ibu Hj. Marni Nisabu, S.Pd, MM , mengemukakan bahwa Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang baik . Kurikulum yang mengikuti perkembangan, Kabupaten Bone Bolango yang pertama melaksanakan Diklat Implementasi Kurikulum 2013 secara mandiri, disamping dana dari APBN. Untuk buku saat ini informasi dalam taraf pengiriman, namun sudah ada CD di sekolah-sekolah yang

sudah diedarkan, semoga tahun ajaran baru bukunya sudah ada dan dapat digunakan oleh para guru, Kadis tinggal koordinasi saja(wawancara 23 Juli 2014).

Selanjutnya Kadis Kabupaten Bone Bolango Marni Nisabu menyatakan bahwa penerapan Kurikulum 2013 di daerah ini berjalan dengan lancar tanpa ada persoalan yang berarti. Menurutnya bahwa sejak awal penerapan Kurikulum 2013 pihaknya memang optimis prosesnya akan berjalan lancar, baik dari pendistribusian buku maupun kapasitas atau pemahaman guru. Untuk pendistribusian buku, pihaknya telah membagikan compact disc (CD) kepada para siswa yang belum mendapatkan buku, sementara gurupun mendapatkan pendampingan.

Para guru tidak mengalami kesulitan saat mengajar dengan menerapkan Kurikulum 2013 karena ada pendamping. Kadis mendambakkan proses pendistribusian buku Kurikulum 2013 hingga saat ini masih terus berlangsung, demikian juga dengan pendampingan untuk para guru. Untuk pendistribusian buku, prosesnya menggunakan jasa pihak ketiga , sementara pendampingan untuk guru pihaknya memberdayakan para guru yang berprestasi di daerah itu. Para guru berprestasi yang ditunjuk sebagai pendamping ini sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu, ujar bu Marni (antaragorontalo.com).

11. Kepala Daerah Kabupaten Boalemo

Pemerintah daerah Kabupeten Boalemo diwakili Sekda Bapak Drs. H. Sujarno Abdul Hamid di ruang kerjanya mengemukakan bahwa penelitian ini lebih spesifik dan terfokus apa yang diteliti maka kembalikan ke Budaya yakni karakter, karena karakter itu lewat budaya. Implementasi Kurikulum 2013 itu basisnya karakter , dimulai dari kebiasaan bisa mendarahdaging, lama kelamaan jadi terbiada dan membudaya. Jadi mengembalikan ke rel yang benar sehingga nilai-nilai dasar terpahami dan terpelihara terus serta terwujud dalam kehidupan sehari-hari (wawancara Kamis, 14 Agustus 2014 pk 13.00).

12. Kepala Dinas Kabupaten Boalemo

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo diwakili Kabid Dikmen Bapak Roni Taningo, S.Pd di ruang kerjanya menyatakan bahawa dalam hal memperkuat implementasi Kurikulum 2013 disiapkan dana untuk kegiatan pendampingan . Untuk mempersiapkan tenaga pendidik LPMP sudah melaksanakan Diklat bagi para guru dengan dana APBN dan kolaborasi dengan Pemda dengan dana APBD (wawancara 14 Agustus 2014).

13. Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato

Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato diwakili oleh Bagian Umum , karena semua pejabat tidak ada ditempat, diarahkan ke Diknas Kabupaten Pohuwato.

14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pohuwato diwakili oleh Kasi Kurikulum Dikmen Bapak Rais Mukmin, S.Pd mengemukakan bahwa untuk sekolah-sekolah sasaran guru-gurunya sudah terpanggil semianya mengikuti sosialisasi maupun Diklat. Kesulitan yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum 2013 adalah merubah pola pikir guru itu susah, karena rumitnya penialain yang mengacu pada penilaian proses, dan mengharapakan peran aktif dari guru yang bersangkutan. Untuk buku masih diberikan dalam bentuk CD yang diperbanyak (wawancara 15 Agustus 2014).

c. Temuan Umum

Secara umum peneliti dapat mendeskripsikan implementasi kurikulum 2013 ditinjau dari kesiapan tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo rata-rata sudah siap mengimplementasikan Kurikulum 2013. Para Guru kelas I dan Kelas IV setuju dengan Kebijakan Pemerintah tentang Implementasi Kurikulum 2013, siap mengimplementasikan Kurikulum 2013. Hal ini didukung dengan kegiatan sosialisasi dan Diklat yang telah diikuti oleh para guru kelas I dan Kelas IV yang diselenggarakan oleh LPMP dengan baik itu melalui biaya APBN maupun APBD yang terprogram secara bertahap dan berkesinambungan di seluruh wilayah Kabupaten – Kota Provinsi Gorontalo. Sosialisasi dan Diklat Kurikulum 2013 ini sangat bermanfaat untuk membantu dalam memberikan wawasan dan pemahaman kepada para guru bagaimana mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran.

Dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 tentunya diawali dengan analisis buku guru dan buku siswa kemudian dilanjutkan dengan penyusunan perangkat pembelajaran : pemetaan kompetensi, analisis silabus, penyusunan RPP, Penyusunan bahan ajar, penyusunan LKPD , penetapan media pembelajaran, penyusunan instrumen penilaian yang dilengkapi dengan pedoman penskoran dan rubrik penilaian. Disela-sela penyusunan perangkat ini terdapat beberapa guru mengalami kesulitan dalam menyusun instrumen penilaian. Namun berkat kerjasama yang dilakukan dalam kegiatan Diklat bahkan dilanjutkan dengan kegiatan KKG hal ini sedikitnya teratasi.

Berbagai faktor yang sangat mendukung implementasi Kurikulum 2013 yakni adanya instruktur yang berkompeten, buku pedoman guru, buku paket siswa, sehingga dapat memudahkan dalam pembelajaran. Namun tidak dapat dipungkiri terdapat juga faktor yang

dapat menghambat implementasi kurikulum ini yakni kemampuan guru yang bersangkutan yang hanya menunggu bola, tidak punya inisiatif dan kurang kreatif dalam pembelajaran.

Sesuai wawancara dan kuisioner yang diedarkan oleh peneliti kepada para guru kelas I dan Kelas IV dinyatakan bahwa tidak mudah mengimplementasikan Kurikulum 2013 terutama masalah pembelajarannya dalam satu hari, waktunya tidak cukup, banyak kegiatan yang dilakukan, sehingga para siswapun sulit menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, dan pada akhirnya menjadi pekerjaan rumah untuk siswa.

Para tenaga pendidik atau guru SD kelas I dan Kelas IV ternyata Sebagian besar menyukai adanya implementasi Kurikulum 2013. Mereka menyatakan dengan menerapkan Kurikulum 2013 para siswa aktif, senang belajar dengan pendekatan saintifik yang dimulai dengan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan atau membangun jejaring antar muatan mata pelajaran, dilengkapi dengan penilaian autentik.

Guru kelas I dan kelas IV menyatakan dalam pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik, siswa dapat menemukan sendiri bagaimana cara memecahkan suatu masalah dengan menggunakan komponen-komponen mengamati, menanya, menalar dan mencoba, dan mengkomunikasikan.

d. Temuan Khusus

Temuan khusus yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah dengan implementasi Kurikulum 2013 tenaga pendidik dalam hal ini para guru di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo di satu sisi sangat antusias dalam menyambut datangnya Kurikulum 2013. Namun di lain sisi dalam merancang perangkat pembelajaran utamanya dalam instrumen penilaian agak sulit dan ribet dalam menyusunnya. Para guru mengalami kesulitan menyusun instrumen tersebut, sehingga menjadi beban buat mereka setiap merancang pembelajaran.

Terdapat sekolah-sekolah sasaran yang belum menerima buku pedoman guru maupun buku siswa diantaranya SDN di Kota Tengah Kota Gorontalo, SDN di Kabupaten Gorontalo, SDN di Kabupaten Pohuwato. Untuk mengantisipasi hal ini mereka mengcopi buku yang diperoleh dari Diklat, namun hasil kopian tersebut kurang menarik siswa karena gambarnya hitam putih. Ada juga CD namun terdapat sebagian guru yang masih sulit mengoperasikan komputer/laptop, sehingga mengalami kendala dalam pembelajaran. Belum lagi banyaknya tuntutan administrasi, sehingga para guru paling banyak disibukkan dengan administrasi tersebut sehingga mengakibatkan guru kurang fokus dalam pelaksanaan pembelajaran, karena sudah kecapean.

Tidak semua calon siswa yang masuk ke SD berasal dari Taman Kanak-kanak (TK) sehingga sulit untuk membaca, menulis dan menghitung. Terdapat guru yang mengajar berkeahlian Non Kependidikan (Ilmu Murni seperti Sarjana Ekonomi, bahkan ada guru yang belum berkeahlian S1, ada yang masih status D-II, ada guru tidak tetap (GTT, tetapi dalam menerima kebijakan pemerintah mereka setuju, paham dalam implementasi Kurikulum 2013, mereka sudah mengikuti sosialisasi, bahkan telah mengikuti diklat implementasi Kurikulum 2013 baik melalui dana APBN maupun dana APBD. Untuk lebih jelasnya sekolah-sekolah sasaran dari implementasi Kurikulum 2013 di Kabupaten – Kota Provinsi Gorontalo dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1
SEKOLAH SASARAN K-13 DI SDN PROPINSI GORONTALO
(Tenaga Pendidik Kelas I /IV)

No	Sekolah	Nama Guru	Kls		Kegiatan		Sumber Dana	
			I	IV	Sosialisasi	Diklat	APBN	APBD
1.	SDN 1 Tilamuta	Raplin H	v		v	v	v	
		Hartati I	v		v	v	v	
		Yamin A		v	v	v	v	
		Yolan R		v	v	v	v	
2.	SDN 15 Tilamuta	Kristina L	v		v	v	v	
		Syaiful B		v	v	v	v	
3.	SDN 8 Paguyaman	Rabia D	v		v	-	-	
		Dewice B		v	v	v		
4.	SDN 2 Paguyaman	Indra G	v		v	v	v	
		Herman I.		v	v	v	v	
5.	SDN 7 Paguyaman	Fitriyanti	v		v	v	v	
		Vonny L		v	v	v	v	
		Wely T		v	v	v	v	
6.	SDN 7 Tibawa	Kartin H	v		v	v	v	
		Sutrisna K		v	v	v	v	
7.	SDN 12 Tibawa	Rita K. O	v		v	v	v	
		Habiba T		v	v	v	v	

8.	SDN 8 Tibawa	Evi H	v		v	v	v	
		Lisnawati			v	v	v	v
9.	SDN 14 Tibawa	Yusni L	v		v	v	v	
		Iin L			v	v	v	v
10.	SDN 2 Tabongo	Rubianti	v		v	v	v	
		Karsum T			v	v	v	v
11.	SDN 2 Botubilotahu	Ningsi P	v		v	v	v	
		Hasna B	v		v	v	v	
		Nining T	v		v	-	-	
		Abd.Talib			v	v	v	v
		Marlan Y			v	v	v	v
12.	SDN Inpres Banuroja	Suyatun	v		v	v	v	
		Ni Wayan			v	v	v	v
13.	SDN 1 Marisa Selatan	Yulla N. A	v		v	v	-	
		Warni G	v		v	v	-	
		Ningsih Dj			v	v	-	-
		Endang B			v	v	v	-
14.	SDN Ayula	Rusna S	v		v	v	v	
		Selvi H			v	v	v	v
15.	SDN 8 Kabila Bone	Asna P	v		v	v	v	
		Sriratmi P			v	v	v	v
16.	SDN 1 Bone	Puspita N	v		v	v	v	
		Hantiman			v	v	v	v
17.	SDN 5 Bulango Selatan	Amna D	v		v	v	v	
		Dian P			v	v	v	v
18.	SDN 3 Bulango Timur	Fatma M	v		v	v	v	
		Ningsi Dj			v	v	v	v
19.	SDN 2 Ponelo	Harmisah	v		v	v	v	
		Riyenti N. L			v	v	v	v
20.	SDN 1 Deme	Darisna	v		v	v	v	

		Sersi P		v	v	v	v
21.	SDN 2 Tititdu	Arpan Y	v		v	v	v
		Maryam S		v	v	v	v
22.	SDN 2 Leboto	Hasna V	v		v	v	v
		Asra B		v	v	v	v
23.	SDN 1 Molinggapoto	Selvi K	v		v	v	v
		Riasni P	v		v	v	v
		Rita A		v	v	v	v
24.	SDN 102 Kota Utara	Saripa I	v		v	v	v
		Sri Hajati		v	v	v	v
25.	SDN 82 Kota Tengah	Asma M	v		v	v	v
		Ferawati Al	v		v	v	v
		Ronald L		v	v	v	v
		Warni		v	v	v	v
26.	SDN 85 Kota Tengah	Aisa T	v		v	v	v
		Karsum A	v		v	v	v
		Hapit K		v	v	v	v
		Ahmad K		v	v	v	v
27.	SDN 93 Sapatana	Hadidjah A	v		v	v	v
		Amna H		v	v	v	v
		Erni K		v	v	v	v
28.	SDN 17 Kota Barat	Ragustian	v		v	v	v
		Yanto P		v	v	v	v
29.	SDN 24 Duingi	Rosmawati	v		v	v	v
		Drs. Gafar		v	v	v	v
30.	SDN 30 Kota Selatan	Irni Y	v		v	v	v
		Fitri D	v		v	v	v
		Yuni B	v		v	v	v
		Sri Dewi	v		v	v	v
		Meity P		v	v	v	v

		Fidyawati	v	v	v	v
		Budiharti R	v	v	v	v
31.	SDN 33 Kota Selatan	Risko S	v	v	v	v
		Fatma M	v	v	v	v
		Marina U	v	v	v	v
		Siske Y	v	v	v	v
32.	SDN 46 Hulontalo	Yusni M	v	v	v	v
		Aifa S	v	v	v	v
		Siyati H	v	v	v	v
		Taufik	v	v	v	v
		Moh Id	v	v	v	v
33.	SDN 61 Kota Timur	Maryam S	v	v	v	v
		Rasuna H	v	v	v	v
		Linda M	v	v	v	v
		Zenab M	v	v	v	v
		Lusiana R	v	v	v	v
34.	SDN 77 Kota Tengah	Darmawati	v	v	v	v
		Karto N	v	v	v	v
35.	SDN 80 Kota Tengah	Liek I	v	v	v	v
		Silfoni P	v	v	v	v
		Astin R	v	v	v	v

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sekolah-sekolah sasaran dari Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo sejumlah 33 SD yang dapat dijangkau dengan jumlah responden kelas I dan kelas IV bervariasi, ada yang data awal paralel, ternyata ditemukan di lapangan tidak paralel, sementara yang data awal yang tidak paralel, namun ditemukan paralel sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan kepala-kepala SD di wilayah Kabupaten – Kota Provinsi Gorontalo. Untuk jumlah respon yang dapat dijangkau 94 responden, masih 4 responden yang tidak muncul dalam rekapitan tabel di atas yakni 2 Sekolah sasaran (SD Negeri 1 Bone kelas I : 1 responden kelas IV: 1 responden dan untuk

SD Negeri 1 Deme kelas I : 1responden , kelas IV : 1 responden), sehingga jumlah totalnya 98 responden dan 35 sekolah sasaran.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kesiapan dari tenaga pendidik yakni para guru sasaran Kurikulum 2013 di sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo yang dijaring lewat kuisioner yang diedarkan kepada sejumlah responden sesuai dengan lokus penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 4.2
HASIL KUISIONER IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
DITINJAU DARI
KESIAPAN TENAGA PENDIDIK DI SDN PROVINSI GORONTALO

No	Nama Responden	Aspek yang dinilai										Jlh Skor	%	Kategori
		Kebijakan Pemerintah		Paham K 13		Implements K 13		Sosialisasi		Diklat				
		S	TS	S	TS	S	TS	Ya	Tdk	Ya	Tdk			
		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0			
1.	Raplin H	v		v		v		v		v		5	100	Siap
2.	Hartati I	v		v		v		v		v		5	100	Siap
3.	Yamin A	v		v		v		v		v		5	100	Siap
4.	Yolan R	v		-	v	v		v		v		4	80	Siap
5.	Kristina L	v		v		v		v		v		5	100	Siap
6.	Syaiful B	v		v		v		v		v		5	100	Siap
7.	Rabia D	v		v		v		v		-	v	4	80	Siap
8.	Dewice B	v		v		v		v		v		5	100	Siap
9.	Indra G	v		v		v		v		v		5	100	Siap
10.	Herman I	v		v		v		v		v		5	100	Siap
11.	Fitriyanti	v		v		v		v		v		5	100	Siap
12.	Vonny L	v		v		v		v		v		5	100	Siap
13.	Wely T	v		v		v		v		v		5	100	Siap
14.	Kartin H	v		v		v		v		v		5	100	Siap
15.	Sutrisna	v		v		v		v		v		5	100	Siap
16.	Rita K	v		v		v		v		v		5	100	Siap
17.	Evi H	v		v		v		v		v		5	100	Siap
18.	Lisna	v		v		v		v		v		5	100	Siap
19.	Habiba	v		v		v		v		v		5	100	Siap
20.	Yusni L	v		v		v		v		v		5	100	Siap
21.	Iin L	v		v		v		v		v		5	100	Siap
22.	Rubi	v		v		v		v		v		5	100	Siap
23.	Karsum	v		v		v		v		v		5	100	Siap
24.	Ningsi P	v		v		v		v		v		5	100	Siap
25.	Hasna B	v		v		v		v		v		5	100	Siap
26.	Nining T	v		v		v		v		-	v	4	80	Siap
27.	Abd.Talib	v		v		v		v		v		5	100	Siap
28.	Marlan Y	v		v		v		v		v		5	100	Siap
29.	Suyatun	v		v		v		v		v		5	100	Siap
30.	Ni Wayan	v		v		v		v		v		5	100	Siap
31.	Yulla N.	v		v		v		v		v		5	100	Siap
32.	Warni G	v		v		v		v		v		5	100	Siap
33.	Ningsih	v		v		v		v		v		5	100	Siap
34.	Endang B	v		v		v		v		v		5	100	Siap
35.	Rusna S	v		v		v		v		v		5	100	Siap
36.	Selvi H	v		v		v		v		v		5	100	Siap
37.	Asna P	v		v		v		v		v		5	100	Siap

38.	Sriratmi	v		v		v		v		5	100	Siap
39.	Puspita N	v		v		v		v		5	100	Siap
40.	Hantiman	v		v		v		v		5	100	Siap
41.	Amna D	v		v		v		v		5	100	Siap
42.	Dian P	v		v		v		v		5	100	Siap
43.	Fatma M	v		v		v		v		5	100	Siap
44.	Ningsi Dj	v		v		v		v		5	100	Siap
45.	Harmisah	v		v		v		v		5	100	Siap
46.	Riyenti N	v		v		v		v		5	100	Siap
47.	Darisna	v		v		v		v		v	100	Siap
48.	Sersi P	v		v		v		v		v	100	Siap
49.	Arpan Y	v		v		v		v		5	100	Siap
50.	Maryam	v		v		v		v		5	100	Siap
51.	Hasna V	v		v		v		v		5	100	Siap
52.	Asra B	v		v		v		v		5	100	Siap
53.	Selvi K	v		v		v		v		5	100	Siap
54.	Riasni P	v		v		v		v		5	100	Siap
55.	Rita A	v		v		v		v		5	100	Siap
56.	Saripa Ib	v		v		v		v		5	100	Siap
57.	Sri Hajati	v		v		v		v		5	100	Siap
58.	Asma M	v		v		v		v		5	100	Siap
59.	Ferawati	v		v		v		v		5	100	Siap
60.	Ronald L	v		v		v		v		5	100	Siap
61.	Warni	v		v		v		v		5	100	Siap
62.	Aisa T	v		v		v		v		5	100	Siap
63.	Karsum	v		v		v		v		5	100	Siap
64.	Hapit K	v		v		v		v		5	100	Siap
65.	Ahmad K	v		v		v		v		5	100	Siap
66.	Hadidjah	v		v		v		v		5	100	Siap
67.	Amna H	v		v		v		v		5	100	Siap
68.	Erni Kadir	v		v		v		v		5	100	Siap
69.	Ragustian	v		v		v		v		5	100	Siap
70.	Yanto P	v		v		v		v		5	100	Siap
71.	Rosmawat	v		v		v		v		5	100	Siap
72.	Drs. Gafar	v		v		v		v		5	100	Siap
73.	Irni Y	v		v		v		v		5	100	Siap
74.	Fitri D	v		v		v		v		5	100	Siap
75.	Yuni B	v		v		v		v		5	100	Siap
76.	Sri Dewi	v		v		v		v		5	100	Siap
77.	Meity P	v		v		v		v		5	100	Siap
78.	Fidyawati	v		v		v		v		5	100	Siap
79.	Budiharti	v		v		v		v		5	100	Siap
80.	Risko S	v		v		v		v		5	100	Siap
81.	Fatma M	v		v		v		v		5	100	Siap
82.	Marina U	v		v		v		v		5	100	Siap
83.	Siske Y	v		v		v		v		5	100	Siap
84.	Yusni M	v		v		v		v		5	100	Siap
85.	Aifa S	v		v		v		v		5	100	Siap
86.	Siyati H	v		v		v		v		5	100	Siap
87.	Taufik	v		v		v		v		5	100	Siap
88.	Moh I	v		v		v		v		5	100	Siap
89.	Maryam S	v		v		v		v		5	100	Siap
90.	Rasuna H	v		v		v		v		5	100	Siap
91.	Linda M	v		v		v		v		5	100	Siap
92.	Zenab M	v		v		v		v		5	100	Siap
93.	Lusiana	v		v		v		v		5	100	Siap
94.	Darm	v		v		v		v		5	100	Siap
95.	Karto N	v		v		v		v		5	100	Siap

96.	Liek I	v		v		v		v		v		5	100	Siap
97.	Silfoni	v		v		v		v		v		5	100	Siap
98.	Astin R	v		v		v		v		v		5	100	Siap
Jumlah		98		97		98		98		96				9740
Persentase		100		98.98		100		100		97.96				99.39%

Keterangan:

Tenaga pendidik yang siap 100% sejumlah 95 orang (96.94%)

Tenaga Pendidik yang siap 80% sejumlah 3 orang (3.06%)

Interpretasi data hasil penelitian tentang implementasi Kurikulum 2013 :

Nilai persentase = $\frac{\text{Jumlah Tenaga pendidik yang siap Implementasi K 13}}{\text{Jumlah seluruh tenaga pendidik sekolah sasaran K 13}} \times 100\%$

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuisisioner yang diedarkan menunjukkan bahwa implementasi kurikulum ditinjau dari kesiapan tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo pada aspek kebijakan pemerintah rata-rata tenaga pendidik atau para guru sejumlah 98 orang (100%) setuju menerima kebijakan pemerintah tentang Implementasi Kurikulum 2013 tersebut. Pada aspek keterpahaman dari Kurikulum 2013 dilihat dari jawaban responden sejumlah 97 orang (98.98%) paham tentang karakteristik Kurikulum 2013. Pada aspek kesiapan mengimplementasikan Kurikulum 2013 terdapat sejumlah 98 orang responden (100%) antusias melaksanakan Kurikulum 2013. Untuk aspek mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013 sejumlah 98 orang (100%) responden telah mengikuti sosialisasi tentang implementasi Kurikulum 2013. Sementara untuk Diklat sejumlah 96 orang (97.96 %) telah mengikuti Diklat yang dilaksanakan oleh LPMP dengan dana APBN. Sedangkan sejumlah 2 orang (2.04%) yang belum mengikuti Diklat Implementasi Kurikulum 2013 karena yang bersangkutan (1 orang) baru pindah ke sekolah yang menjadi sasaran Kurikulum 2013 tersebut , dan 1 orang lagi pada saat Diklat dalam keadaan sakit. Dengan demikian dapat dideskripsikan sesuai dengan hasil wawancara dan kuisisioner yang diedarkan bahwa umumnya tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo sudah siap mengimplementasikan Kurikulum 2013.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pemahaman Tenaga Pendidik tentang Kurikulum 2013

Tenaga pendidik (guru) harus memahami kurikulum 2013 dengan sempurna. Sebab kurikulum merupakan sarana atau arena dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum sebagai program pendidikan yang direncanakan secara sistematis berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan, yang pada akhirnya akan menentukan

macam lulusan suatu lembaga pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut, maka sebagai lembaga pendidikan harus melaksanakan kurikulum.

Sesuai hasil wawancara dan analisis kuisioner yang diedarkan kepada responden mengenai pemahaman tentang kurikulum 2013 umumnya tenaga pendidik sudah paham mengenai karakteristik dari kurikulum tersebut, dari 98 responden semuanya 98 orang 100% menyatakan diri sudah memahami kurikulum 2013.

b. Kesiapan Tenaga Pendidik di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran tenaga pendidik dalam hal ini guru dalam mengimplementasi kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo sangat diharapkan. Olehnya itu perlu kesiapan-kesiapan yang matang mengikuti sosialisasi yang serius, mengikuti Diklat yang benar, bersemangat dan antusias agar dapat memiliki kompetensi yang diharapkan.

Tenaga pendidik (guru) dalam dunia pendidikan adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan mulai dari jalur anak usia dini, jalur pendidikan, pendidikan dasar, dan menengah (Suprihatiningrum, 2012 : 24). oleh karena itu, demi mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan kreatif maka gurulah yang memegang peranan penting dalam pembelajaran terutama dalam menerapkan kurikulum sebagai pedoman ataupun acuan dalam merancang perangkat pembelajaran. Sehebat apapun kurikulum kalau ditangan guru yang tidak hebat, tidak kreatif maka tidak akan berhasil pembelajaran. Olehnya itu untuk mengantisipasinya membuat guru yang kreatif sangat diperlukan bimbingan dan latihan secara kontinu dan berkelanjutan demi pengembangan profesionalisme guru yang bersangkutan apakah melalui Diklat, studi lanjut, seminar ilmiah, diskusi panel, kelompok kerja guru, simposium, lokakarya, workshop maupun karya yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal yang nantinya akan berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menemukan beberapa temuan umum dan temuan khusus dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. Terdapat faktor yang dapat mendukung penerapannya, ada juga faktor yang menghambat pelaksanaan Kurikulum tersebut, sehingga menyebabkan ketidakberhasilan dalam pembelajaran.

Tenaga pendidik (guru) adalah merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan dalam implementasi Kurikulum, bahkan sangat menentukan berhasil dan

tidaknya peserta didik dalam belajar. Kalau dilihat dari program pemerintah yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dengan instansi yang terkait baik dengan dana APBN ataupun APBD dalam rangka mempersiapkan sekolah dan guru sasaran untuk menerapkan Kurikulum 2013, maka secara teoritis tenaga pendidik atau para guru Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo dapat dinyatakan siap.

Untuk melihat dan mengetahui bahwa tenaga pendidik atau para guru sasaran Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo tahap I: kelas I dan kelas IV untuk tahun 2013 sudah menyatakan siap, maka disini pemerintah dalam hal ini LPMP dan instansi yang terkait mengadakan upaya-upaya yakni mengadakan sosialisasi bahkan Diklat yang dapat merubah pola pikir dan mengarahkan untuk menjadikan para guru sasaran ini untuk siap dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 tersebut. Adapun usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) kerjasama dengan instansi yang terkait secara bertahap menyelenggarakan Diklat Kurikulum 2013 untuk Tahap I : kelas I dan IV bulan Juli tahun 2013, Tahap II kelas II dan V bulan Juli 2014, Tahap III : kelas III dan kelas VI bulan Juli tahun 2015, kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Bagi tenaga pendidik (para guru) yang belum memahami Kurikulum 2013 maka usaha LPMP, instansi yang terkait : Dinas Dikbutpora, Dinas Kabupaten - Kota, Pemda Kabupaten – Kota kolaborasi dengan kepala sekolah mengikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi dan Diklat.
2. Selain itu juga Kepala Dinas Kabupaten – Kota dan kepala sekolah mengharuskan para guru yang belum mengerti dan belum mengimplementasikan kurikulum 2013 diwajibkan mengikuti kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang berkaitan dengan perbaikan proses dan hasil pembelajaran, pendekatan, Model maupun metode pembelajaran yang inovatif.
3. Kepala Dinas mengawasi secara rutin semua kegiatan di atas, dan mewajibkan kepada semua tenaga pendidik (Guru) mulai dari Guru SD sampai SMA/SMK menerapkan Kurikulum 2013 dalam pembelajaran di kelas. Bahkan ada Kepala Dinas secara spontan mengemukakan: Jika seandainya ada tenaga pendidik yang tidak mengimplementasikan Kurikulum 2013, secara tegas dinyatakan silakan cari sekolah yang tidak implementasi Kurikulum 2013.

Harapan Besar Implementasi Kurikulum 2013

Postingan oleh Fathur Rokhman (07/31/2013) bahwa Kurikulum 2013 resmi diberlakukan di 6.329 sekolah dari jenjang SD hingga SMA di Indonesia mulai 15 Juli 2013. Di Jawa Tengah, berdasar data Sistem Elektronik Pemantauan Implementasi Kurikulum 2013 (Epik), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk 877 sekolah sebagai sekolah sasaran pemberlakuan kurikulum baru. Meskipun masih ada kontroversi, visi luhur kurikulum 2013 sangat menarik untuk dikaji.

Di tengah pro dan kontra terkait implementasi Kurikulum 2013, pemerintah tentu punya harapan besar untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik. Pembinaan ini sudah seyogianya didukung oleh segenap elemen pendukung pendidikan. Para pendidik, akademisi, termasuk lembaga perguruan tinggi kependidikan (LPTK) harus bersama melakukan penguatan.

Dari tujuan tersebut, paradigma yang kemudian harus dibangun adalah berupaya sinergis, menyiapkan berbagai sarana penunjang termasuk kompetensi tenaga pendidik agar lebih siap dalam mengaplikasikan kurikulum baru. Dalam hal ini, pemerintah tentu tidak bisa sendirian dalam merealisasikan pembenahan sistem pendidikan. Tanpa dukungan segenap lini, pendidikan yang lebih baik hanyalah angan-angan belaka.

Memang, melalui media kita masih saja melihat kekurangan bahan ajar dan kekurangiapan berbagai komponen pendukung implementasi kurikulum 2013. Di berbagai daerah, masih saja terjadi kekurangan buku pelajaran sebagai piranti utama pembelajaran. Di Jawa Tengah, misalnya pada jenjang SMA, sekolah baru menerima buku dari tiga mapel, sedangkan SMP untuk mapel agama belum tersedia. Akan tetapi, hal tersebut sudah semestinya tidak menjadi hambatan karena pendidik dapat mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk membuat silabus pembelajaran, sesuai dengan Permendikbud No 69 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 (SM, 20/7/13).

Kompetensi Utama

Sebagaimana sering dikemukakan oleh Mendikbud Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh dalam berbagai kesempatan, Kurikulum 2013 telah dirancang sedemikian rupa agar siswa mampu meraih kompetensi utama, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor). Kompetensi tersebut diharapkan dapat menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skills dan soft skills. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah memandang perubahan kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 merupakan ikhtiar dalam peningkatan mutu pendidikan Indonesia.

Di antara keunggulan kurikulum 2013, pada jenjang SD/MI, pembelajaran dilakukan dengan metode tematik-integratif. Guru disyaratkan mampu mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam tema yang berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Pada jenjang SMP/MTs, organisasi Kompetensi Dasar kurikulum dilakukan dengan cara mempertimbangkan kesinambungan antarkelas dan keharmonisan antarmata pelajaran. Berdasarkan pendekatan ini, maka terjadi reorganisasi Kompetensi Dasar mata pelajaran sehingga struktur Kurikulum SMP/MTs menjadi lebih sederhana karena jumlah mata pelajaran dan jumlah materi berkurang.

Dengan adanya tambahan jam belajar ini dan pengurangan jumlah Kompetensi Dasar, guru tentu memiliki keleluasaan waktu untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi siswa aktif belajar. Proses pembelajaran siswa aktif memerlukan waktu yang lebih panjang dari proses pembelajaran penyampaian informasi karena peserta didik perlu latihan untuk melakukan pengamatan, bertanya, berasosiasi, dan berkomunikasi. Karena peserta didik mungkin belum terbiasa, proses pembelajaran yang dikembangkan guru menuntut kesabaran karena menunggu respon. Selain itu, bertambahnya jam belajar memungkinkan guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Waktu yang dilalui guru bersama murid pun menjadi lebih lama, sehingga diharapkan proses pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal.

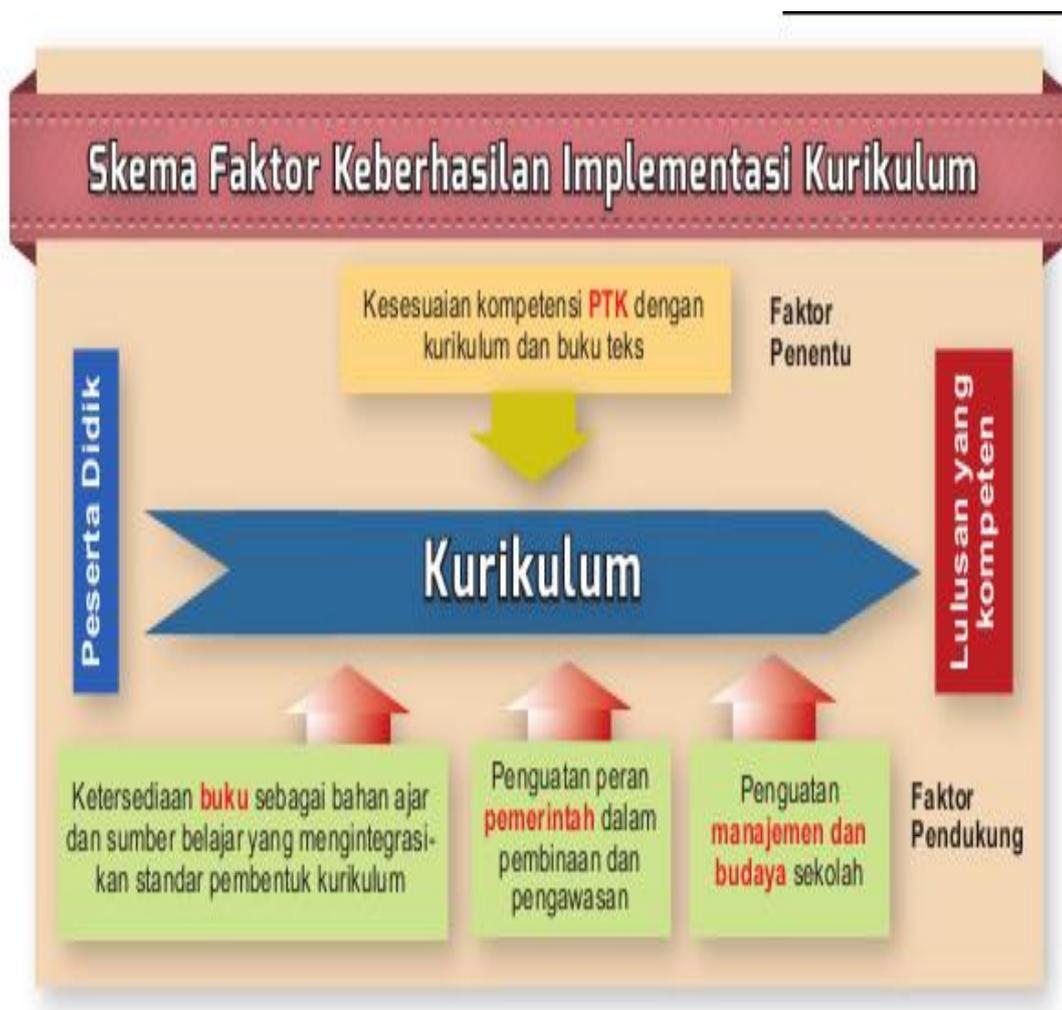
Maksimumkan Peran

Dari perihal teknis di atas, terungkap betapa kolaborasi siswa dan guru begitu kentara. Semenjak pendidikan dasar, siswa sudah diharapkan mampu membangun pola interaksi yang baik dengan sesama dan diajak peka terhadap apa yang ada di sekitarnya. Supaya hasil maksimal, guru tentu dituntut selalu berinovasi dalam pembelajaran.

Dalam ranah tersebut, LPTK sudah seyogianya memberikan penguatan. Pelatihan terhadap tenaga pendidik, di luar tanggung jawabnya mencetak tenaga pendidik yang mumpuni, merupakan kewajiban mendasar. Hal inilah yang membuat LPTK mampu memaksimumkan peran dalam ranah kependidikan.

Pada kenyataannya, Kurikulum 2013 memiliki visi yang luhur, yaitu tidak sekadar menempatkan siswa sebagai objek akademik yang berilmu, tetapi lebih dari itu, karakter dan soft skills sebagai bagian tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk berbudaya teramat penting untuk disematkan.

Bagai kapal induk yang melaju, Kurikulum 2013 adalah sebuah harapan besar ke depan. Dengan mengoptimalkannya, kita telah menjadi bagian yang senantiasa memperteguh cita-cita mulia pendidikan Indonesia. Keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 menjadi angin segar bagi capaian cita-cita Generasi Indonesia Emas 2045. Semoga Allah Tuhan yang Maha luas ilmuNya meridhoi ikhtiar kita semua (Fathur Rokhman, 2013 dalam kemdikbud.go.id). Dalam penyiapan tenaga pendidik (guru) sangat memerlukan kolaborasi yang baik antar komponen yang terkait agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya untuk mengetahui faktor keberhasilan implementasi kurikulum 2013 dapat dilihat pada skema berikut ini.



Skema : Keberhasilan Implementasi Kurikulum 2013

Terkait dengan faktor pertama, Kemdikbud sudah mendesain strategi penyiapan guru sebagaimana digambarkan pada skema penyiapan guru yang melibatkan tim pengembang kurikulum di tingkat pusat; instruktur diklat terdiri atas unsur dinas pendidikan, dosen, widyaiswara, guru inti, pengawas, kepala sekolah; guru utama meliputi guru inti, pengawas,

dan kepala sekolah; dan guru mereka terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran SD, SMP, SMA, SMK.

Pada diri guru, sedikitnya ada empat aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam rencana implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013, yaitu kompetensi pedagogi; kompetensi akademik (keilmuan); kompetensi sosial; dan kompetensi manajerial atau kepemimpinan. Guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum, diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemungkinan terjadinya perubahan.

Kesiapan guru lebih penting daripada pengembangan kurikulum 2013. Kenapa guru menjadi penting? Karena dalam kurikulum 2013, bertujuan mendorong peserta didik, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), terhadap apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Melalui empat tujuan itu diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Disinilah guru berperan besar di dalam mengimplementasikan tiap proses pembelajaran pada kurikulum 2013. Guru ke depan dituntut tidak hanya cerdas tapi juga adaptif terhadap perubahan (kemdiknas.go.id).

Dalam rangka implementasi Kurikulum 2013, terdapat dua faktor yang dapat menentukan keberhasilan kurikulum 2013 antara lain: Pertama, faktor penentu, yaitu kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dengan kurikulum dan buku teks. Kedua, faktor pendukung yang terdiri dari tiga unsur, yakni :

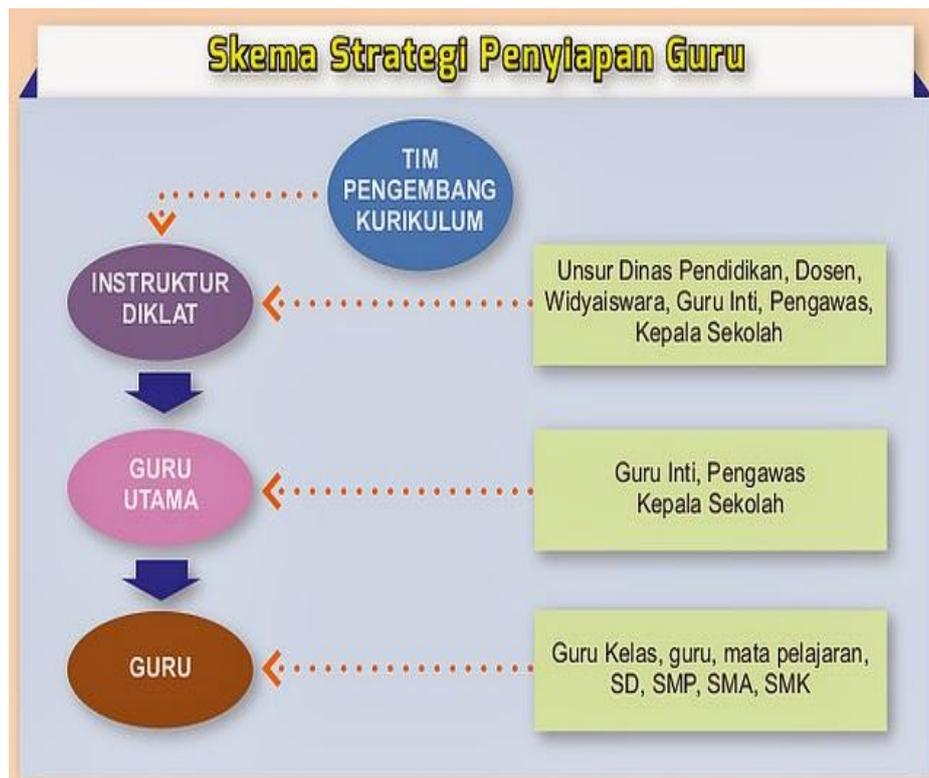
1. Ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan standar pembentuk kurikulum;
2. Penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan; dan
3. Penguatan manajemen dan budaya sekolah.

Terkait dengan faktor pertama, Kemdikbud sudah mendesain strategi penyiapan guru sebagaimana digambarkan pada skema penyiapan guru yang melibatkan tim pengembang kurikulum di tingkat pusat; instruktur diklat terdiri atas unsur dinas pendidikan, dosen, widya swara, guru inti, pengawas, kepala sekolah; guru utama meliputi guru inti, pengawas, dan kepala sekolah; dan guru mereka terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran SD, SMP, SMA, SMK (Posted Wed, 12/26/2012 - 10:11 by [sidiknas](#)). Untuk penyiapan tenaga pendidik (guru) dapat dilihat pada skema strategi penyiapan guru.

Pada dasarnya pada setiap tenaga pendidik (guru) haruslah memiliki empat kompetensi yang diberi porsi atau perhatian khusus dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, yakni:

1. Kompetensi pedagogik
2. Kompetensi akademik (keilmuan);
3. Kompetensi sosial; dan
4. Kompetensi manajerial atau kepemimpinan.

Skema : Strategi Penyiapan Guru



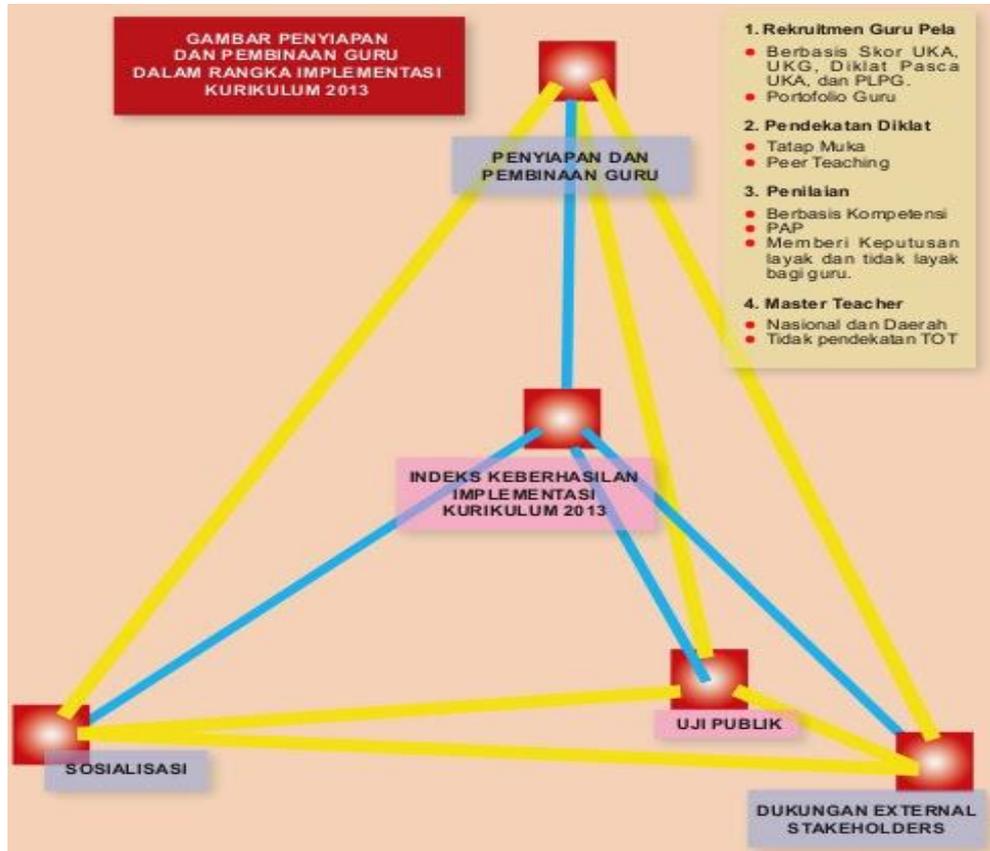
Sumber: kemdiknas.go.id

Guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum, diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemungkinan terjadinya perubahan. Guru harus dapat merubah mind setnya dalam melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan produktif.

Kesiapan guru lebih penting daripada pengembangan kurikulum 2013. Kenapa guru menjadi penting? Karena dalam kurikulum 2013, bertujuan mendorong peserta didik, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), terhadap apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum,

diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemungkinan terjadinya perubahan. Bagaimana penyiapan tenaga pendidik dalam implementasi kurikulum 2013 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar : Penyiapan –Pembinaan Guru dalam Implementasi K 13



Sumber :

<http://dadangjsn.blogspot.com/2014/03/faktor-penentu-dan-faktor-pendukung.html> 9 sept 2014-09-09

Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota :

1. Pemerintah bertanggungjawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum.
2. Pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional.
3. Pemerintah propinsi bertanggungjawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di propinsi terkait.

4. Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten/kota terkait.

Tabel : Kebijakan Implementasi Kurikulum 2013

Strategi Diklat Kurikulum 2013 bagi Guru Kelas/Mapel, Kepala Sekolah, dan Pegawai :



Kegiatan Pelatihan bagi tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berlangsung dari tahun 2013 s.d. tahun 2015 dilaksanakan pemerintah dalam mempersiapkan PTK sebagai ujung tombak dalam implementasi kurikulum 2013.

Tabel : Implementasi Kurikulum 2013 pada seluruh jenjang pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun Pelajaran	Kelas
1	SD	2013/2014	I, IV
		2014/2015	I, II, IV, V
		2015/2016	I, II, III, IV, V, VI
2	SMP	2013/2014	VII
		2014/2015	VII, VIII
		2015/2016	VII, VIII, IX
3	SMA / SMK	2013/2014	X
		2014/2015	X, XI
		2015/2016	X, XI, XII

Pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan secara bertahap telah dilakukan pada beberapa sekolah sasaran sejak bulan Juli tahun pelajaran 2013/2014, hingga pada tahun pelajaran 2015/2016 dipastikan implementasi kurikulum 2013 sebagai pengganti KTSP 2006 berlaku untuk semua kelas pada seluruh jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA / SMK dan berlaku dari bulan Juli pada setiap tahun pelajarannya.



Tabel : Pelaksanaan Kurikulum 2013

Sumber:

<http://dadangjns.blogspot.com/2014/06/penerapan-implementasi-kurikulum-2013.html> 9 sept 2014-09-09

Sesuai dengan hasil wawancara dan analisis kuisioner yang diedarkana kepada responden bahwa tenaga pendidik sudah siap mengimplementasikan Kurikulum 2013, dari 98 responden semua responden (100%) menyatakan siap mengimplementasikan kurikulum 2013.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung implementasi Kurikulum 2013 antara lain:

1) Tenaga pendidik (Guru)

Tenaga pendidik (guru) sebagai pelaksana pembelajaran yang secara langsung menerapkan Kurikulum. Oleh sebab itu setiap guru haruslah memahami karakteristik kurikulum yang diterapkan dan memiliki kompetensi yang diharapkan. Untuk memiliki kompetensi tentunya perlu pelatihan-pelatihan secara terprogram yang dilaksanakan oleh lembaga penjaminan mutu pendidikan atau instansi yang terkait baik melalui dana APBN maupun APBD. Tenaga Pendidik atau Guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembelajaran, merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Untuk itu Guru harus mampu merancang perangkat pembelajaran yang baik mulai dari : mengkaji kurikulum, membuat pemetaan kompetensi, menganalisis silabus, menyusun RPP, menyusun bahan ajar, menyusun Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) , menetapkan media pembelajaran, menyusun instrumen penilaian

sekaligus dengan pedoman dan rubrik penilaian, sehingga siswa mudah tanggap, mudah memahami pembelajaran yang diberikan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

- 2) Buku yang tersedia. Ketersediaan buku, apakah buku pedoman guru ataupun buku paket siswa ini adalah salah satu pendukung keberhasilan pembelajaran. Tenaga pendidik (guru) yang memiliki buku pegangan secara spontan akan mempermudah dalam penyajian materi pembelajaran. Demikian pula siswa yang memiliki buku paket yang sesuai dengan kurikulum pasti mereka terbantu dan mudah memahami pembelajaran.
- 3) Adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik dari semua komponen yang terkait, utamanya kepala sekolah, para guru dan siswa yang ada di sekolah masing-masing, maka pasti akan terwujud motivasi yang kuat, kebersamaan akan terjalin maka tujuan pasti akan tercapai sehingga implementasi kurikulum baru terlaksana secara optimal.
- 4) Adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana sangat penting untuk setiap lembaga pendidikan. Jika sarana dan prasarana tersedia dan memadai maka semua kegiatan sekolah akan lancar dan pasti kegiatan pembelajaranpun akan menjadi lancar.

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat implementasi Kurikulum 2013 antara lain:

- 1) Guru yang kurang kreatif. Guru memang adalah ujung tombak dari pelaksana pembelajaran. Sebaik apapun kurikulum, sesempurna apapun kurikulum kalau gurunya kurang antusias, kurang proaktif, kurang kreatif, tidak inovatif, jalan di tempat tidak mau merubah pola pikirnya, kurang menyesuaikan diri dengan sikon, kurang menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan zaman, maka pasti implementasi kurikulum akan gagal. Namun sebaliknya jika guru selalu antusias, proaktif, kreatif, inovatif dalam mengimplementasikan kurikulum, maka pasti pembelajaran akan tercapai sesuai dengan harapan.
- 2) Buku yang tidak tersedia. Ketidaksiediaan buku di tempat apakah buku pegangan guru ataupun buku paket siswa, hal ini menjadi salah satu penghambat pembelajaran, karena guru tidak dapat menyajikan pembelajaran dengan benar dan optimal. Guru bingung materi apa yang akan diberikan, ada buku saja kadang-kadang dalam penyusunan perangkat pembelajaran tumpang tindih, tidak konsisten antara Kompetensi Dasar dengan Indikator, indikator dengan instrumen penilaian, apalagi tidak adanya buku bahkan akan lebih parah.
- 3) Kemampuan dan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan ini tenaga pendidik (guru) mengalami kendala dalam pelaksanaan pembelajaran. Karena secara fisik dan mental siswa haruslah siap menerima pembelajaran, namun jika

kemampuannya kurang , maka berarti waktu pembelajarannyapun harus ditambah agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

- 4) Kurangnya dukungan dari orang tua. Orang tua umumnya kurang mendukung adanya kurikulum baru, kalau diperhadapkan dengan beban pembelian buku baru yang sesuai dengan kurikulum baru, karena dengan adanya sinyal dari Pemerintah Provinsi bahwa sekolah gratis. Jadi dalam pikiran para orang tua tidak ada lagi yang didanai di sekolah, kalau tiba-tiba ada pembelian buku baru, jelas orang tua kurang setuju, dan tidak mau mengeluarkan uang, karena dalih sekolah gratis.
- 5) Kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, apakah perangkat keras ataupun perangkat lunak. Perangkat keras , seperti: gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan yang digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan perangkat lunak seperti: kurikulum, buku, pendekatan dan metode pembelajaran, dan lain sebagainya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis kuisioner tentang implementasi kurikulum ditinjau dari kesiapan tenaga pendidik (guru) di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemahaman tenaga pendidik (guru) di Sekolah Dasar Negeri Provinsi Gorontalo tentang Kurikulum 2013 rata-rata sudah paham tentang karakteristik kurikulum 2013.
2. Tenaga pendidik (guru) sudah siap mengimplementasikan Kurikulum 2013, dengan melihat kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) ataupun kerjasama dengan instansi yang terkait: Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Gorontalo (Dikbudpora), Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, baik kegiatan ini melalui dana APBN ataupun APBD untuk mengikuti kegiatan sosialisasi maupun Diklat Kurikulum 2013, bahkan ditindaklanjuti dengan kegiatan KKG di masing-masing gugus dengan tujuan dapat meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme tenaga pendidik (guru) dalam hal memperbaiki mutu/kualitas pembelajaran.
3. Faktor pendukung suksesnya Kurikulum 2013 adalah guru yang berkompentensi, buku yang tersedia, kerjasama dengan komponen sekolah, serta sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat sama dengan faktor pendukung hanya saja kebalikannya yakni guru yang kurang kreatif, buku tidak tersedia, kurangnya kerjasama yang baik dari semua komponen sekolah Kepala Sekolah dengan guru sebagai pelaksana pembelajaran dengan stakholder, orang tua yang acuh tak acuh, kemampuan dan karakteristik siswa yang berbeda-beda, dan sarana dan prasarana yang tidak memadai.

B. Saran

Berdasarkan beberapa simpulan tersebut di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah, diharapkan komitmen dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 yang tentunya memerlukan dukungan semua pihak. Namun konsistensi pun harus dipertahankan dan ditingkatkan. Jangan sampai terjadi perubahan pemegang kekuasaan akan berubah, terjadi pergantian pemimpin maka akan berubah pula kurikulum yang diterapkan.

2. Untuk Penyelenggara pendidikan, dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 hendaknya penyelenggara pendidikan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, antara orang tua, masyarakat dan pemerintah, karena pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama agar pendidikan dapat berkualitas dan bermakna.
3. Untuk Pendidik atau guru. Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya adalah mengajar disamping tugas lainnya, yang sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil pembelajaran, sehingga guru akan tampil menjadi sosok yang memiliki kompetensi, mampu merancang pembelajaran yang berkualitas dengan pendekatan saintifik serta penilaian autentik. Untuk mengharapkan implementasi kurikulum 2013 dapat terlaksana secara maksimal, maka diperlukan peran guru mengubah mindsetnya, harus menjadi motivator, dinamisator, fasilitator dalam membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif yang berbasis kinerja dan berbasis karakter.
4. Untuk perguruan tinggi diharapkan tetap mengikuti perkembangan Imtak dan Iptek dengan berbagai inovasi pendidikan terutama dalam pengembangan kurikulum yang berbasis kinerja dan karakter dalam mencapai kualitas pendidikan yang proporsional antara sikap, pengetahuan dan keterampilan.
5. Untuk peneliti lain. Diharapkan penelitian ini dapat berlanjut dengan evaluasi terhadap implementasi Kurikulum 2013 pada semua jenjang pendidikan agar dapat diketahui mutu pembelajarannya.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan rekomendasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Diklat Kurikulum 2013 perlu dilakukan secara berkelanjutan kepada tenaga pendidik, orang tua dan stake holders secara merata di Kabupaten /Kota, bahkan ditingkatkan terus agar dapat dipahami dengan baik Kurikulum 2013.
2. Perlu dukungan stakeholder terutama Pemda Kabupaten /Kota dalam memfasilitasi kelancaran sosialisasi dan diklat dalam hal penyiapan dana melalui APBD jangan hanya mengandalkan APBDN demi meningkatkan kesiapan tenaga pendidik dalam menyelesaikan implementasi Kurikulum 2013 secara maksimal.
3. Bagi Pemerintah/ instansi yang terkait mulai dari LPMP, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Pemda Kabupaten /Kota tetap terus berkolaborasi, berkoordinasi, memfasilitasi dalam mendukung kelancaran kegiatan sosialisasi, Diklat maupun pendampingan secara merata demi peningkatan kesiapan tenaga pendidik mengimplementasikan K13.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aspin, David N dan Chapman Judith D. 2007. *“Values Education and Lifelong Learning”*: Principles, Policies, Programmes. Netherlands: Springer.
- Bernardin, John H. dan Joyce E. A. Russell. 1998. *“Human Resources Management”*: An Experiential Approach. New York: Irwin/ McGraw-Hill.
- Brannen, Julia. 2005. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Catharina, Hartini. 2005. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Guru Terhadap Kurikulum Berbasis Kompetensi”*: Studi Kasus Pada Guru-Guru SMK Putra Tama Bantul Yogyakarta, download 23 April 2014, search engine: google.com.
- Chamisijatin, Lise dkk. 2008. *“Bahan Ajar Cetak”*: Pengembangan Kurikulum SD. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Creswell, John W. Dan Vicki L. Plano Clark. 2007. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. California: Sage Publication, Inc.
- Danim, Sudarwan dan H. Khairil. 2010. *Profesi Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Dewantara, Ki Hadjar. 1961. *Pendidikan*. Jogjakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Djam’an , Satori & Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Djumiran dkk. 2009. *“Bahan Ajar Cetak”*: Profesi Keguruan. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Downs, Anthony. 1967. *Inside Bureaucracy*, (Eigth Printing). Boston: Little, Brown and Company.
- Dadangjsn. 2014. *Faktor Penentu dan Pendukung Implementasi Kurikulum*. [http://dadangjsn.blogspot.com/faktor-penentu-dan faktor-pendukung-html/](http://dadangjsn.blogspot.com/faktor-penentu-dan-faktor-pendukung-html/) 09 sept 2014.
- Fathurrohman, Pupuh dan Aa Suryana. 2012. *Guru Profesional*. Bandung: Refika Aditama.
- Ferguson, Adam. 1768. *An Essay on History of Civil Society*. London: Printed for Millar, Cadel, Kincaid, and Bell.
- Hamid, Hamdani. 2012. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Korten, David C dan Syahrir. 1980. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : . Remaja Posdakarya.
- Muzamiroh, Mida Latifatul. 2013. *“Kurikulum 2013”*: Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum 2013. Diterbitkan oleh Kata Pena.
- Rakhman, Fathur. 2013. *Harapan Kurikulum*. <http://kemendikbud.go.id/kemendikbud/artikel-harapan-kurikulum> (09 sept 2014)
- Sagala, Syaiful. 2011. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.

- Saondi, Ondi dan Aris Suherman. 2012. *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Refika Aditama.
- Saudagar, Fachruddin dan Ali Idrus. 2009. *Pengembangan Profesionalitas Guru*. Jakarta: GP Press.
- Singarimbun, Masri dan Soffian Effendi (Ed). 1986. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.
- Soetjipto dan Raflis Kosasi. 2009. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Kerja Sama Rineka Cipta dan Pusat Perbukuan Depdiknas.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2008. "*Pengembangan Kurikulum*": *Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suprihatiningrum, Jamil. 2013. "*Guru Profesional*": *Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syaifuddin, Mohammad dkk. 2007. "*Bahan Ajar Cetak*": *Manajemen Berbasis Sekolah*. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Pengembang MKDP. 2011. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Yamin, Moh. 2012. "*Kurikulum Pendidikan*": *Panduan Lengkap Tata Kelola Kurikulum Efektif*. Jogjakarta: Diva Press.
- Yulaelawati, Ella. 2004. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung: Pakar Raya.

Regulasi

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586.